



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERIMAAN PAJAK RESTORAN DI KOTA PADANAG

SKRIPSI



**AAM TOTO GINANJAR
06951051**

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG 2012**

LEMBARAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**"Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Restoran
Di Kota Padang"**

Merupakan hasil karya saya sendiri, dan tidak terdapat sebagian atau keseluruhan dari tulisan yang memuat kalimat, ide, gagasan, atau pendapat yang berasal dari sumber lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis asli. Adapun bagian-bagian yang bersumber dari karya orang lain telah mencantumkan sumbernya sesuai dengan norma, etika dan kaidah penulisan ilmiah. Apabila dikemudian hari ditemukan *plagiat* dalam skripsi ini, saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Padang, Agustus 2012

Yang memberi pernyataan;

Aam Toto Ginanjar

06951051

	No. Alumni Universitas	AAM TOTO GINANJAR	No. Alumni Fakultas
	BIODATA a). Tempat/Tanggal Lahir: Rimbo Bujang/30 Agustus 1987 b). Nama Orang Tua: M. Raharjo dan Leginem c). Fakultas: Ekonomi d). Jurusan: Ilmu Ekonomi e). No. Bp: 06951051 f). Tanggal Lulus: 05 Agustus 2012 g). Predikat Lulus: Sangat Memuaskan h). IPK: i). Lama Studi : 5 Tahun 11 Bulan j). Alamat Orang Tua: Jl. R.A. Kartini unit II Rimbo Bujang		

Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Restoran Di Kota Padang

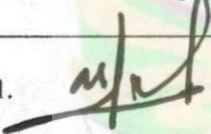
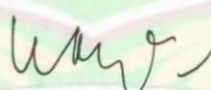
Skripsi S1 Oleh : **Aam Toto Ginanjar**, Pembimbing : **Drs. Masrizal, M. Soc, Sc**

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dari variabel PDRB, Jumlah Kunjungan Wisatawan dan Jumlah Penduduk terhadap variabel Penerimaan Pajak Restoran di Kota Padang. Analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan menggunakan program SPSS 16.0. Hasil yang diperoleh dari pengolahan data menunjukkan bahwa PDRB, Jumlah Kunjungan Wisatawan dan Jumlah Penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak Restoran di Kota Padang. Karena itu, diharapkan Pemda Kota Padang mampu mendorong peningkatan PDRB, Jumlah Kunjungan Wisatawan dan mengatur Jumlah Penduduk sehingga dapat meningkatkan penerimaan Pajak Restoran di Kota Padang.

Keywords: Penerimaan Pajak Restoran, PDRB, Jumlah Penduduk dan Jumlah Kunjungan Wisatawan

Skripsi telah dipertahankan di depan sidang penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 5 Agustus 2012. Abstrak telah disetujui oleh pembimbing dan penguji:

Tanda Tangan	1. 	2. 	3. 
Nama Terang	Drs. Masrizal, M. Soc, Sc (Pembimbing)	Dra. Wahyuni E. Marinda, ME (Pembahas I)	Neng Kamarni, SE. M.Si (Pembahas II)

Mengetahui:

Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi: **Prof. Dr. H. Firwan Tan, Se, M.Ec. DEA. Ing**

NIP. 130812952


Tanda Tangan

Alumnus telah terdaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat nomor Alumnus:

	Petugas Fakultas / Universitas	
No. Alumni Fakultas :	Nama:	Tanda Tangan:
No. Alumni Universitas :	Nama:	Tanda Tangan:

KATA PENGANTAR



Puji syukur saya panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Restoran Di Kota Padang”**. Skripsi ini merupakan salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana ekonomi jurusan ilmu ekonomi pada fakultas ekonomi Universitas Andalas Padang, serta salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan dan tauladan kita nabi besar Muhammad Saw.

Terima kasih yang sebesar-besarnya, saya ucapkan kepada **Bapak Drs. Masrizal, M.Soc, Sc** sebagai pembimbing saya, dengan penuh kesabaran membimbing saya dalam menyusun skripsi ini. Penulis tidak dapat menyelesaikan skripsi ini tanpa adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Maka pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih juga kepada semua pihak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan, yaitu :

1. **Bapak Prof. Tafdil Husni, SE, MBA, Ph.d** selaku dekan Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.
2. **Bapak Prof.Dr.H. Firwan Tan, SE,M.Ec.DEA.Ing** selaku ketua jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.
3. **Ibu Neng Kamarni, SE.M.Si** selaku ketua program reguler mandiri jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.
4. **Ibu Dra. Wahyuni E. Marinda, ME** dan **Ibu Neng Kamarni, SE. M.Si** selaku dosen penguji yang telah memberikan saran-saran demi perbaikan skripsi ini.

5. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi beserta Stafnya yang telah memberikan pembelajaran dan bantuan yang sangat berguna.
6. Kedua Orang Tua dan seluruh keluarga yang telah memberikan pengorbanan, doa, semangat, baik moril maupun materi selama Saya menuntut ilmu serta dalam pembuatan skripsi ini.
7. Buat Vie thanks atas semuanya yang di berikan, yang selalu ada buat I'am baik susah maupun senang.
8. Selanjutnya untuk teman-temanku Afiendra, SE, Dorri Mittra Candana, SE, Ahmad Suwandi, SE, Ade Himawan, SE, Tedy Kumbara, Riki, Wewen dan Sadat mudah-mudahan jadi orang galo..aminnn

Selaku hamba Allah SWT, sesungguhnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang dapat membangun untuk kesempurnaan skripsi ini dari berbagai pihak. Akhir kata penulis berharap semoga bermanfaat bagi banyak pihak.

Padang, September 2012

Penulis

UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	
LEMBARAN PENGESAHAN	
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR DAN GRAFIK	vii
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
1.5 Hipotesa Penelitian.....	6
1.6 Sistematika Penulisan.....	6
 BAB II LANDASAN TEORI	
2.1 Landasan Teori.....	8
2.1.1 Pengertian Pajak.....	8
2.1.2 Fungsi dan Peran Pajak	9
2.1.3 Klasifikasi dan Macam Pajak	11
2.1.4 Pajak Restoran.....	18
2.2 Produk Domestik Regional Bruto	20
2.3 Penduduk.....	22
2.4 Pariwisata	23
2.5 Tinjauan Literatur.....	25
 BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis dan Sumber Data	28
3.2 Operasional Variabel.....	28
3.3 Metode Analisa Data	29
3.4 Pengujian Asumsi Klasik	31
3.4.1 Uji Normalitas	31
3.4.2 Multikolinearitas.....	32
3.4.3 Auto Korelasi.....	33
3.4.4 Heteroskedastisitas	34

3.5 Uji Hipotesis Statistik.....	35
3.5.1 Uji F (F-test).....	35
3.5.2 Uji t (t-test).....	36
3.5.3 Koefisien Determinasi.....	37

BAB IV GAMBARAN UMUM KOTA PADANG

4.1 Deskripsi Objek Penelitian.....	38
4.1.1 Keadaan Geografis.....	38
4.1.2 Penduduk dan Luas Wilayah.....	38
4.2 Analisis Data.....	39
4.2.1 Pertumbuhan Ekonomi.....	39
4.2.2 Perkembangan Pendapatan Daerah.....	42
4.2.3 Perkembangan Penerimaan Pajak Restoran di Kota Padang.....	43
4.2.4 Perkembangan PDRB Kota Padang.....	47
4.2.5 Kependudukan Kota Padang.....	51
4.2.6 Perkembangan Kunjungan Wisatawan di Kota Padang.....	54

BAB V ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

5.1 Analisis Data.....	60
5.1.1 Uji Asumsi Klasik.....	60
5.1.1.1 Uji Normalitas.....	60
5.1.1.2 Uji Multikolinearitas.....	61
5.1.1.3 Uji Autokorelasi.....	62
5.1.1.4 Uji Heteroskedastisitas.....	63
5.2 Pengujian Hipotesis.....	63
5.2.1 Uji Simultan (F-test).....	64
5.2.2 Uji Parsial (t-test).....	64
5.3 Koefisien Determinasi.....	67
5.4 Persamaan Regresi.....	67

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan.....	69
6.2 Saran.....	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 4.1	Luas Wilayah, Rumah Tangga, Penduduk dan Kepadatan Penduduk Kota Padang Tahun 2010	39
Tabel 4.2	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Padang Menurut Lapangan Usaha Tahun 2007-2010	41
Tabel 4.3	Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Padang Tahun 2006-2010	42
Tabel 4.4	Perkembangan Penerimaan Pajak Restoran Kota Padang 2001-2010.....	44
Tabel 4.5	Realisasi dan Pertumbuhan Penerimaan Pajak Restoran di Kota Padang Tahun 2001-2010	46
Tabel 4.6	Nilai dan Pertumbuhan PDRB Atas Harga Konstan 2000 Kota Padang Tahun 2001-2010	49
Tabel 4.7	Kontribusi Sektor Lapangan Usaha Terhadap Total PDRB di Kota Padang Atas Harga Konstan 2000 Tahun 2005-2010	50
Tabel 4.8	Perkembangan Jumlah Penduduk Kota Padang Tahun 2001-2010	52
Tabel 4.9	Jumlah Pencari Kerja Yang Terdaftar Menurut Tingkat Pendidikan Yang Ditamatkan Kota Padang Tahun 2010	53
Tabel 4.10	Jumlah Wisatawan Yang Berkunjung di Kota Padang Tahun 2001-2010	57
Tabel 4.11	Jumlah Wisatawan Domestik dan Asing Yang Berkunjung di Kota Padang Tahun 2001-2010	58
Tabel 5.1	Uji Multikolinearitas	61
Tabel 5.2	Uji Autokorelasi	62
Tabel 5.3	Hasil Perhitungan Nilai F-test	64

Tabel 5.4 Hasil Perhitungan Nilai t-test 65

Tabel 5.5 Hasil Perhitungan Nilai Koefisien Determinasi 67



**DAFTAR
GAMBAR DAN GRAFIK**

	Halaman
Gambar 5.1 Uji Normalitas	60
Gambar 5.2 Uji Heteroskedastisitas	63



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan nasional di suatu negara diselenggarakan oleh masyarakat bersama dengan pemerintah secara bahu-membahu. Untuk dapat mensukseskan pembangunan nasional, peran penerimaan dalam negeri menjadi sangat penting. Tidak mungkin roda pemerintahan dan pembangunan nasional dapat digerakkan tanpa adanya dukungan dana terutama yang berasal dari penerimaan dalam negeri. Selain itu, negara dalam menyelenggarakan pemerintahan mempunyai kewajiban untuk menjaga kepentingan rakyatnya, baik dalam bidang kesejahteraan, keamanan, pertahanan, maupun kecerdasan kehidupannya. Untuk mewujudkan kepentingan-kepentingan tersebut, negara membutuhkan dana. Dana yang akan dikeluarkan ini salah satunya tentu didapat dari rakyat itu sendiri melalui pemungutan yang disebut dengan pajak.

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan dalam Negeri Indonesia yang paling potensial. Pajak ini nantinya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Peran pajak, baik sebagai sumber penerimaan dalam negeri maupun sebagai penyelaras kegiatan ekonomi pada masa-masa yang akan datang, akan sangat penting bagi negara kita. Peran utama pajak bagi Negara Indonesia ada dua, yaitu sebagai alat penerimaan negara (*fungsi budgeter*) dan sebagai alat pengatur (*fungsi regulatory*). Fungsi budgeter berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, sedangkan fungsi regulatory berfungsi untuk mengatur

pertumbuhan ekonomi. Fungsi pajak yang pertama, yaitu sebagai alat penerimaan negara, menempatkan pajak sebagai andalan pemerintah untuk menghasilkan penerimaan yang setinggi-tingginya dari sektor pajak. (Rahman, 2010)

Industri restoran merupakan salah satu industri kerakyatan yang mendukung perekonomian Indonesia dan menampung banyak tenaga kerja. Apabila pemerintah menurunkan pajak restoran yang merupakan tarif tertinggi saat ini sebesar 10 persen tentunya yang sangat diuntungkan adalah masyarakat, karena akan meningkatkan daya beli mereka.

Namun ada satu hal yang pula diperbaiki oleh Pemerintah Daerah untuk meningkatkan daya saing industri restoran ini yaitu dengan menurunkan batasan peredaran usaha (*omset*) pengusaha restoran yang harus memungut Pajak Restoran. (Indra, 2008)

Pemungutan pajak restoran oleh Pemko Padang telah diatur melalui undang-undang perpajakan Nomor 28 Tahun 2009 dan tidak ada lagi alasan bagi pengelola pajak restoran tidak melakukan pemungutan secara intensif untuk meningkan pendapatan daerah. Petugas pajak harus aktif, baik dalam melakukan sosialisasi maupun pemungutan kepada pengelola restoran. Sehingga target pajak tersebut dapat terealisasi.

Pajak Restoran yang dikenakan kepada pemilik restoran diatur oleh Perda Kota Padang Nomor 3 Tahun 2011. Dimaksud dengan Restoran tersebut yaitu fasilitas penyediaan makanan serta minuman yang dipungut bayarannya termasuk rumah makan, kafetaria, kantin, warung, katering (jasa boga), bar dan sejenisnya 75 persen kategori hiburan mewah.

Pemungutan pajak restoran, makan dan minum tidak hanya dibebankan kepada orang pribadi atau masyarakat saja, tapi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pun juga dibebankan pajak itu. setiap SKPD yang mengadakan acara, dan memesan katering, dikenakan pajak sembilan persen yang langsung dimasukkan dalam harganya. Sedangkan orang pribadi dan masyarakat dibebankan sebesar 10 persen.

Sektor perdagangan, hotel dan restoran merupakan penyumbang kedua terbesar dalam pembentukan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Kota Padang. Pada tahun 2006 kontribusinya sebesar 16,96 persen, mengalami kenaikan pada tahun 2007 menjadi 17,34 persen, pada tahun 2008 mengalami sedikit peningkatan menjadi 17,66 persen, dan meningkat lagi pada tahun 2009 menjadi sebesar 17,84 persen. Kemudian pada tahun 2010 mengalami penurunan menjadi sebesar 17,78 persen, penurunan ini disebabkan oleh adanya bencana gempa bumi dipenghujung tahun 2009 yang mampu melumpuhkan sektor-sektor penunjang penerimaan pajak restoran di Kota Padang. (BPS.Kota Padang 2010)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan alat pengukur pertumbuhan ekonomi untuk mengetahui maju tidaknya perekonomian suatu daerah. PDRB merupakan nilai barang dan jasa yang diproduksi didalam suatu daerah dalam satu periode tertentu. Pertumbuhan perekonomian suatu daerah merupakan gambaran tentang komposisi perekonomian daerah dimana dalam hal ini komposisi perekonomian daerah terdiri atas sektor ekonomi atau lapangan usaha. Sehingga struktur ekonomi sekaligus dapat menunjukkan tinggi rendahnya kontribusi atau peran seluruh sektor ekonomi terhadap pembentukan PDRB pada daerah tersebut. (Sukirno,2005)

Penduduk disamping sebagai faktor produksi juga membutuhkan konsumsi terhadap barang dan jasa. Salah satu kebutuhan konsumsi yang mendasar oleh penduduk adalah kebutuhan makan. Kebutuhan makanan tidak hanya disediakan pada rumah tangga, individu maupun masyarakat. Tetapi untuk daerah perkotaan kebutuhan makanan tersebut sangat banyak disediakan oleh restoran. Oleh karena itu menurut (Liliyana, 2010) apabila jumlah penduduk meningkat maka jumlah kebutuhan makanan yang disediakan oleh restoran juga akan mengalami peningkatan. Hal ini secara sekaligus sudah tentu akan dapat meningkatkan penerimaan Pajak Restoran di daerah tersebut.

Pembangunan sektor kepariwisataan menurut (Spillane, 1999) akan terkait dengan aspek sosial budaya, politik, dan ekonomi yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bahwa penyelenggaraan kepariwisataan ditujukan untuk meningkatkan pendapatan nasional dalam rangka kesejahteraan dan kemakmuran rakyat melalui perluasan dan pemerataan kesempatan berusaha dan bekerja serta mendorong pembangunan infrastruktur daerah dalam rangka kemudahan untuk memperkenalkan dan mendayagunakan objek dan daya tarik wisata.

Berdasarkan latar belakang diatas suatu hal yang lazim dilakukan dalam pelaksanaan pengelolaan pajak Restoran guna mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhinya penerimaan Pajak Restoran di Kota Padang dan kebaikan dalam kegiatan yang telah dilaksanakan dalam waktu tertentu. Pelaksanaan kerja pada akhirnya akan menggambarkan kinerja institusi terhadap aktiva yang telah dilakukan. Oleh sebab itu dalam rencana penelitian ini dilakukan kajian pengelolaan pemunggutan pajak restoran di lingkungan Dinas Pendapatan Kota

Padang. Hasil penelitian ini nantinya akan disajikan dalam bentuk skripsi dengan judul **“ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERIMAAN PAJAK RESTORAN DI KOTA PADANG”**.

1.2. Perumusan Masalah

Persoalan dalam pencapaian target penerimaan pajak restoran, ruang lingkupnya bisa cukup luas dan memiliki dampak yang mempengaruhinya :

Berdasarkan uraian diatas dan latar belakang permasalahan, maka dapat dirumuskan permasalahan :

1. Bagaimana perkembangan penerimaan pajak restoran di Kota Padang selama periode 2001-2010.
2. Bagaimana pengaruh PDRB, Jumlah Penduduk, dan Jumlah Kunjungan Wisatawan terhadap penerimaan pajak restoran di Kota Padang.

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perkembangan penerimaan pajak restoran di Kota Padang selama periode 2001-2010.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh PDRB, Jumlah Penduduk, dan Jumlah Kunjungan Wisatawan terhadap penerimaan pajak restoran di Kota Padang.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi manfaat sebagai berikut :

1. Bagi penulis, penelitian ini merupakan syarat untuk menyelesaikan studi pada Universitas Andalas Padang.

2. Bagi khasanah ilmu pengetahuan, pelaksanaan pemunggutan pajak restoran diharapkan memberikan konstribusi dalam memperluas wawasan ilmu khususnya dibidang pajak daerah.
3. Bagi para wajib pajak, dengan adanya evaluasi pelaksanaan pemunggutan pajak restoran, akan memberikan implikasi praktis untuk meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak.
4. Bagi Dinas Pendapatan Kota Padang studi ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi penting guna meningkatkan penerimaan daerah, khususnya dari subsektor pajak restoran.

1.5. Hipotesis

Hipotesa diuji pada analisis atau variabel-variabel independen yang diduga berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak restoran yaitu PDRB, Jumlah Penduduk, dan Jumlah Kunjungan Wisatawan di Kota Padang.

1.6. Sistematika Penulisan

Penulisan karya akhir dilakukan dengan menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan.

Bab ini menguraikan latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, hipotesis, ruang lingkup, serta sistematika pembahasan.

BAB II : Kerangka Teori

Bab ini membahas tentang kerangka teori yang digunakan dalam pembahasan, serta penelitian terdahulu yang menjadi tinjauan literatur dalam peninjauan ini.

BAB III : Metodologi Penelitian

Bab ini membahas tentang metode analisis data dan sumber data yang digunakan.

BAB IV : Gambaran Umum

Berisi gambaran umum daerah penelitian dan melihat aspek-aspek data yang digunakan.

BAB V : Hasil dan Pembahasan

Berisi hasil penelitian dan pembahasan serta implikasi kebijakan dari penelitian yang dilakukan.

BAB VI : Penutup

Bab ini menguraikan kesimpulan yang dapat diambil terhadap analisa yang telah dilakukan serta saran-saran yang merupakan masukan baik bagi industri maupun pemerintah.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Pajak

Dari segi ekonomi pajak merupakan pemindahan sumber daya dari sektor privat (perusahaan) ke sektor publik. Pemindahan sumber daya tersebut akan mempengaruhi daya beli (*purchasing power*) atau kemampuan belanja (*spending power*) sektor privat agar tidak terjadi gangguan serius terhadap jalannya perusahaan, maka pemenuhan kewajiban perpajakan harus dikelola secara baik. Bagi negara, pajak adalah salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Sedangkan bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih. Setiap perusahaan atau orang yang menjadi Pengusaha Kena Pajak pasti merupakan Wajib Pajak. (Rahman, 2010)

Apabila membahas pengertian pajak, banyak para ahli memberikan batasan tentang pengertian pajak, diantaranya pengertian pajak yang dikemukakan oleh (Brotohardjo dalam Jauhariyyah, 2010) mengatakan bahwa : “Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara yang menyelenggarakan Pemerintah”.

Dari beberapa definisi di atas dapat dikemukakan bahwa pajak adalah suatu pungutan yang dapat dipaksakan oleh pemerintah untuk berbagai tujuan, misalnya untuk membiayai penyediaan barang dan jasa publik, untuk mengatur perekonomian dan dapat juga dipakai untuk mengatur konsumsi masyarakat. Namun dengan demikian masyarakat yang dikenakan pajak tidak dapat secara langsung menikmati penggunaannya yang dilakukan pemerintah. Dalam pemungutannya, pajak yang dipungut terhadap masyarakat itu telah diatur ketetapan-ketetapannya dalam Undang-Undang. (Siregar, 2010)

2.1.2. Fungsi dan Peran Pajak

Dalam hubungannya dengan sistem (Jhingan dalam Muklis, 2010) menjelaskan bahwa dalam usaha meningkatkan penerimaan pajak seiring dengan kemajuan kegiatan ekonomi diperlukan suatu sistem perpajakan yang dapat menjadi pendukung utama perekonomian. Oleh karena itu fungsi pajak adalah:

1. Menciptakan kondisi ekonomi yang mampu memberi rangsangan terhadap peningkatan produksi sektor-sektor riil dalam rangka menghasilkan tingkat pendapatan per kapita masyarakat yang meningkat.
2. Menekan kesenjangan ekonomi terutama dalam mengurangi ketimpangan pendapatan (*undistributed income*) masyarakat.
3. Menggerakkan sumber-sumber ekonomi masyarakat sehingga dapat ditransfer menjadi penerimaan negara sehingga dapat meningkatkan investasi.

4. Menata pengelolaan investasi yang produktif sehingga dapat meningkatkan produktivitas sektor-sektor ekonomi.
5. Memperlambat peningkatan konsumsi masyarakat sehingga dapat meningkatkan investasi.
6. Meningkatkan hasrat menabung masyarakat yang selanjutnya dapat menjadi tambahan investasi.

Sedangkan (Miyasto, 1991) secara rinci mengemukakan tentang fungsi pajak yang digunakan untuk mengatur perekonomian guna mencapai:

1. Tingkat pertumbuhan ekonomi yang cepat
2. Alokasi-alokasi sumber-sumber ekonomi ke arah yang direncanakan
3. Redistribusi pendapatan
4. Stabilisasi ekonomi
5. Pola konsumsi yang lebih efisien
6. Posisi neraca pembayaran yang lebih menguntungkan.

Perbedaan pandangan tentang fungsi pajak antara Jhingan dengan Miyasto terletak pada fungsi investasi. Jhingan berpendapat bahwa salah satu fungsi pajak adalah fungsi investasi, namun Miyasto tidak memasukkan fungsi investasi sebagai bagian dari fungsi pajak. Sebagai gantinya, Miyasto berpendapat pada pentingnya posisi neraca pembayaran sebagai fungsi pajak.

Secara lebih khusus (Connolly and Munro dalam Mukhlis, 2010) menjelaskan bahwa pajak memiliki peran penting dalam pembangunan

ekonomi suatu negara. Pencapaian dalam sasaran dan target pembangunan tidak dapat dicapai secara optimal apabila tidak didukung oleh penerimaan pajak. Dengan demikian Connolly and Munro lebih melihat fungsi pajak pada aspek penggunaannya. Sesuai dengan arti dan perannya, kontribusi pajak terhadap pembangunan haruslah diarahkan pada penyediaan atau pelayanan sektor publik, seperti keamanan, kesehatan, pendidikan dan program-program kesejahteraan lainnya.

2.1.3. Klasifikasi dan Macam Pajak

Dalam berbagai literatur Ilmu Keuangan Negara dan Pengantar Ilmu Hukum Pajak terdapat perbedaan atau penggolongan pajak (*classes of taxes, kind of taxes*) serta jenis-jenis pajak. Perbedaan atau penggolongan tersebut didasarkan pada suatu kriteria, seperti siapa yang membayar pajak; siapa yang pada akhirnya memikul beban pajak; apakah beban pajak dapat dilimpahkan atau dialihkan kepada pihak lain atau tidak; siapa yang memungut; serta sifat-sifat yang melekat pada pajak yang bersangkutan. Pada umumnya pajak digolongkan atas beberapa bagian seperti Pajak Langsung dan Pajak Tidak Langsung, penggolongan pajak pusat dan pajak daerah, menurut golongan pajak, pajak subjektif dan objektif serta menurut pajak pribadi atau menurut pajak kebendaan. (Sofa, 2008)

Menurut golongannya:

1. Pajak langsung, pajak yang dikenakan pada wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan pada orang lain. Dalam arti ekonomis ialah pajak yang beban pembayarannya harus dipikul

sendiri oleh wajib pajak bersangkutan dan tidak boleh dilimpahkan kepada orang lain. Pajak angsumg dalam arti administratif ialah pajak yang dipungut secara berkala. Contoh: pajak penghasilan (Pph).

2. Pajak tidak langsung, pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau ilimpahkan kepada orang lain. Dalam pengertian ekonomis adalah pajak yang beban pembayarannya dapat dilimpahkan kepada orang lain, yang menanggung beban pajak pada akhirnya adalah konsumen. Dalam pengertian administratif adalah pajak uang dipungut setiap terjadi peristiwa yang menyebabkan terhutangnya pajak. Misal saat penyerahan penjualan dari produsen pada konsumen, saat pembuatan akta, surat persetujuan (sewa-menyewa, jual-beli, pinjam-meminjam), pajak pertambahan nilai (Ppn), pajak bea materai (pajak atas dokumen), bea balik nama, pajak tontonan dan sebagainya.

Menurut sifatnya:

1. Pajak Subjektif (pajak perseorangan); ialah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subyeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Dalam pemungutannya pertama-tama memperhatikan keadaan pribadi pembayarnya (subyeknya). Status pembayar pajak akan mempengaruhi besar kecilnya pajak yang akan dibayarkan. Misal status bujangan atau perawan, status kawin, jumlah tanggungan keluarga dalam pajak penghasilan untuk wajib pajak orang pribadi,

2. Pajak objektif. (pajak kebendaan); yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Dalam pemungutannya pertama-tama melihat obyeknya baik berupa benda, keadaan perbuatan dan peristiwa yang menyebabkan kewajiban membayar pajak. Besar kecilnya pajak tidak dipengaruhi oleh keadaan subyeknya, setelah ketemu obyeknya baru dicari subyeknya (orang atau badan yang bersangkutan), contoh: PPN, PKB dan PBB.

Menurut lembaganya pemungutnya:

1. Pajak Pusat (Pajak Negara); adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang penyelenggaraannya dilaksanakan oleh departemen keuangan dan hasilnya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga negara pada umumnya. Contoh: Pajak penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai. Pajak yang dipungut pemerintah pusat, adalah oleh Dirjen Pajak, yakni:

- PPh: Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan pada tingkat keberhasilan tertentu
- PPN (Pajak Pertambahan Nilai Barang dan jasa) dan Ph.Bm. (pajak penjualan atas barang mewah). Keduanya merupakan satu kesatuan sebagai pajak yang dipungut atas konsumsi dalam negeri oleh karena itu terhadap

penyerahan atau import barang mewah selain dikenakan pajak pertambahan nilai juga dikenakan pajak penjualan atas barang mewah

- PBB adalah pajak atas harta tidak bergerak yang terdiri dari tanah dan bangunan (*property tax*)
- Bea Materai adalah pajak yang dikenakan atas dokumen
- Bea Lelang adalah pajak yang dikenakan atas barang yang penjualannya dengan cara penjualan lelang.

Dirjen Bea Cukai, yaitu:

- Bea Masuk: bea atas barang masuk ke dalam kawasan pabean
- Pajak Eksport (*bea keluar*)
- Pajak Pertambahan Nilai (*import*): khusus untuk barang yang dibeli dari luar negeri

Dirjen Moneter, yaitu:

- Pajak atas minyak bumi sebagai penghasilan produk
- Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemda berdasarkan perda masing-masing dan hasilnya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga daerah masing-masing.

(Rindika, 2011)

Pajak Daerah

Peningkatan PAD akan tercapai apabila sumber-sumber yang mempengaruhinya mengalami peningkatan pula, agar sumber-sumber tersebut meningkat maka dalam pengelolaan dan pelaksanaan daerah haruslah optimal. Salah satu sumber yang dapat meningkatkan PAD adalah pajak daerah. Sehingga dengan kata lain bila pemungutan pajak daerah dapat dilaksanakan secara optimal maka pendapatan asli daerahpun dapat meningkat. Seperti yang dikemukakan oleh (Abdul Halim, 2001) "Pajak daerah sebagai salah satu komponen pendapatan asli daerah memiliki prospek yang sangat baik untuk dikembangkan. Oleh sebab itu pajak daerah harus dikelola secara professional dan transparan dalam rangka optimalisasi dan usaha meningkatkan kontribusinya terhadap anggaran pendapatn dan belanja daerah ..."

Pelaksanaan Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah mengacu pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sbb:

- a. Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa yang aman, tertib, sejahtera, dan berkeadilan;
- b. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara;

- c. Bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah;
- d. Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan objek pajak daerah dan retribusi daerah dan pemberian diskresi dalam penetapan tarif;
- e. Bahwa kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tersebut, mendefinisikan Pajak Daerah adalah: “Kontribusi wajib

kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Dalam Peraturan Pemerintah No. 69 tahun 2010 menjelaskan bahwa :

1. Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi.
2. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
4. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

5. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.

Menurut (Lutfi, 2006) Pajak Daerah merupakan pajak yang dikenakan oleh pemerintah daerah kepada penduduk yang mendiami wilayah yurisdiksinya, tanpa langsung memperoleh kontraprestasi yang diberikan oleh pemerintah daerah yang memungut pajak daerah yang dibayarkannya. Pajak daerah ini diatur dalam peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dan disetujui oleh lembaga perwakilan rakyat serta dipungut oleh lembaga yang berada dalam struktur pemerintah daerah yang bersangkutan.

2.1.4. Pajak Restoran

Sedangkan keterkaitan PHR dengan PAD adalah, bahwa PHR merupakan bagian dari pajak daerah. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah:

Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga atau catering. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.

Sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1997 tanggal 4 Juli 1997 tentang Pajak Daerah, yang dimaksud dengan :

1. Hotel adalah bangunan yang khusus untuk orang untuk dapat menginap atau istirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran.
2. Restoran atau rumah makan adalah tempat menyantap makanan atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran.
3. Pajak hotel dan restoran adalah pajak yang dipungut atas pelayanan di hotel dan restoran.
4. Objek pajak hotel dan restoran adalah pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di hotel dan atau restoran.

Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga tidak termasuk objek Pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

- (1). Subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan atau minuman dari restoran.
- (2). Wajib pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran.

Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran.

(1). Tarif pajak restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10 persen (sepuluh persen).

(2). Tarif pajak restoran ditetapkan dengan peraturan daerah.

a. Besaran pokok pajak restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat (2) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39.

b. Pajak restoran yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat restoran berlokasi.

2.2. Produk Domestik Regional Bruto

Produk domestik regional bruto suatu wilayah merupakan nilai seluruh produk dan jasa yang diproduksi di wilayah tersebut tanpa memperhatikan apakah faktor produksinya berasal dari wilayah tersebut atau tidak. Pendapatan yang timbul oleh adanya kegiatan produksi tersebut merupakan pendapatan domestik. Sedangkan yang dimaksud dengan wilayah domestik atau region adalah meliputi wilayah yang berada di dalam wilayah geografis region tersebut. (Badrudin, 2002).

Produk domestik regional bruto dapat juga dihitung berdasarkan atas dua ukuran, yaitu atas dasar harga berlaku dan harga konstan. (Sukirno, 2005) mengemukakan bahwa produk domestik regional bruto atau pendapatan domestik regional bruto pada harga berlaku adalah nilai barang-barang dan jasa-jasa yang

dihasilkan suatu negara dalam satu tahun dan dinilai menurut harga-harga yang berlaku pada tahun tersebut.

Dalam perhitungan produk domestik regional bruto diperlukan suatu pendekatan yang lebih realistik. Akan tetapi selama ini tetap mengacu pada model perhitungan secara nasional, yakni produk domestik bruto (PDB) yang mana dalam perhitungan riilnya didefinisikan oleh (Boediono, 1992) yaitu pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan kenaikan output perkapita. Di sini jelas ada sisi yang perlu diperhatikan, yaitu sisi output totalnya dan sisi jumlah penduduknya. Output perkapita adalah output total dibagi dengan jumlah penduduknya. Jadi proses kenaikan output perkapita tidak bisa dan tidak harus dianalisa dengan melihat apa yang terjadi dengan output total disatu pihak dan jumlah penduduk dilain pihak. Suatu teori ekonomi yang lengkap haruslah bisa menjelaskan apa yang terjadi dengan jumlah penduduk.

Kota Padang merupakan salah satu kota wisata yang ada di Sumatera Barat. Dengan predikat tersebut akan banyak orang yang akan berkunjung ke Kota Padang. Adanya restoran di Kota Padang akan menambah kenaikan sektor lapangan usaha khususnya sektor perdagangan, hotel dan restoran di Kota Padang yang merupakan kontribusi dari PDRB. Hal ini dikarenakan restoran mempunyai pajak yang dipungut dari konsumen yang menggunakan jasa pelayanan restoran. Pajak yang didapat dari restoran tersebut besarnya ditentukan oleh Perda yang berlaku pada pemerintahan daerah Kota Padang itu sendiri.

2.3. Penduduk

Secara umum “penduduk” ditempatkan sebagai (a). input produksi dalam konteks menyediakan tenaga kerja yang diperlukan dalam proses produksi, dan; (b). sebagai konsumen yang menggunakan berbagai sumberdaya ekonomi.

Sebagai input produksi, posisi penduduk dalam pembangunan ekonomi direduksi dalam kaitan dengan penyedia tenaga kerja. Sebagai konsumen, penduduk memiliki peran “menghabiskan” sumberdaya ekonomi yang tersedia. Padahal sumberdaya yang tersedia jumlahnya amat terbatas, dibanding jumlah penduduk yang terus meningkat. (Mundiharno, 1998)

Adam Smith dalam Santosa dan Retno (2005) berpendapat bahwa dengan didukung bukti empiris bahwa pertumbuhan penduduk yang tinggi akan dapat menaikkan output melalui penambahan tingkat dan ekspansi pasar, baik pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri. Penambahan penduduk tinggi yang diiringi dengan perubahan teknologi akan mendorong tabungan dan juga penggunaan skala ekonomi dalam produksi. Penambahan penduduk merupakan satu hal yang dibutuhkan dan bukan suatu masalah, melainkan sebagai unsur penting yang dapat memacu pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Besarnya pendapatan dapat mempengaruhi penduduk. Jika jumlah penduduk meningkat maka pendapatan yang dapat ditarik juga meningkat.

Penduduk merupakan faktor produksi juga membutuhkan konsumsi terhadap barang dan jasa. Salah satu kebutuhan konsumsi yang mendasar oleh penduduk adalah kebutuhan makan. Kebutuhan makanan tidak hanya disediakan

pada rumah tangga, individu maupun masyarakat. Tetapi untuk daerah perkotaan, kebutuhan makanan tersebut sangat banyak disediakan oleh restoran.

Jumlah penduduk Kota Padang sangat banyak dan merupakan ibu kota dari Sumatera Barat. Seiring dengan itu maka penerimaan pajak restoran di Kota Padang juga akan mengalami peningkatan, karena jumlah penduduk yang cukup banyak tersebut menggunakan jasa pelayanan restoran untuk memenuhi kebutuhan makanan. Beban yang dikenakan kepada konsumen atau penduduk terhadap konsumsinya pada pelayanan restoran tersebutlah pajak restoran didapatkan.

2.4. Pariwisata

Menurut (Salah, 2003) Pariwisata adalah suatu aktivitas manusia yang dilakukan secara sadar yang mendapat pelayanan secara bergantian diantara orang-orang dalam suatu negara itu sendiri atau diluar negeri, meliputi pendiaman orang-orang dari daerah lain untuk sementara waktu mencari kepuasan yang beraneka ragam dan berbeda dengan apa yang dialaminya, dimana ia memperoleh pekerjaan tetap. Pariwisata juga merupakan keseluruhan kegiatan, proses dan kaitan-kaitan yang berhubungan dengan perjalanan dan persinggahan dari orang-orang di luar tempat tinggalnya serta tidak dengan maksud mencari nafkah. Kepariwisataan merupakan keseluruhan kegiatan pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat yang ditujukan untuk menata kebutuhan perjalanan dan persinggahan.

(Fieluphly, 2009) Pariwisata merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata terutama pengusahaan objek dan daya tarik wisata serta usaha yang terkait dengan bidang tersebut. Dan Pariwisata atau *tourism* adalah fenomena

yang meliputi perpindahan ke dan tempat tujuan di luar tempat tempat tinggal sehari-hari.

Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang memegang peranan penting dalam penerimaan kas negara pada umumnya dan daerah pada khususnya. Kontribusi sektor pariwisata merupakan iuran seseorang atau badan yang menjalankan kegiatan usaha pariwisata yang diserahkan pada badan atau perkumpulan tertentu.

Dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1990 tentang kepariwisataan (Bab IV pasal 4) disebutkan bahwa objek dan daya tarik wisata terdiri dari atas:

1. Objek dan daya tarik wisata ciptaan tuhan yang maha esa, yang berwujud keadaan alam serta flora fauna.
2. objek dan daya tarik wisata hasil karya ciptaan manusia berupa museum peninggalan sejarah, wisata agro, wisata tirta, wisata buru, wisata petualangan alam, taman rekreasi dan tempat hiburan.

Dapat disimpulkan bahwa pariwisata merupakan kunjungan atau kedatangan orang pada suatu daerah yang dianggap tempat untuk melakukan kegiatan wisata. Kegiatan wisata ini tentu akan meningkatkan mobilitas atau pergerakan perekonomian pada daerah yang menjadi kunjungan wisata. Tentu saja pertumbuhan sektor perdagangan di daerah tersebut akan meningkat pula tergantung seberapa besar atau banyak jumlah kunjungan atau kedatangan dari wisatawan baik wisatawan asing maupun domestik.

Hal ini akan berpengaruh pada PAD yang diakibatkan dari penerimaan retribusi dan pajak daerah yang dikenakan terhadap wisatawan yang berkunjung

pada daerah tersebut. Salah satu pajak yang cukup berperan penting terhadap penerimaan PAD adalah pajak hotel dan restoran. Khususnya pada penerimaan pajak restoran di Kota Padang, tentu akan mengalami kenaikan atas jasa atau pelayanan yang diberikan kepada konsumen. Oleh karena itu, semakin banyak atau kecilnya jumlah wisatawan yang berkunjung di Kota Padang, tentu akan mempengaruhi total penerimaan pajak restoran di kota tersebut.

2.5. Tinjauan Literatur

(Nugraha dan Arvian, 2004) melakukan penelitian tentang analisis Efektifitas Pajak Hotel dan Restoran dan Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Bandung dengan hasil penelitian Laju Pertumbuhan Pajak Hotel & Restoran Mencapai rata-rata 18,41 persen pertahun Potensi Pajak Hotel & Restoran selama tahun 2003 Potensi PHR yang semestinya diterima Rp. 99.542.947.990,- Tingkat Efektivitas PHR kota Bandung selama tahun 2003 mencapai 61,60 persen (Baik) Kontribusi Pajak Hotel & Restoran terhadap PAD selama tahun 2003 Berdasarkan realisasi sesungguhnya mencapai 30,56 persen. Berdasarkan Potensi mencapai 41,78 persen. Dengan terciptanya kerangka dasar proses penetapan pajak ini diharapkan hasil perolehannya dapat meningkat sehingga pertumbuhan PHR terus meningkat dan sekaligus memberikan kontribusi yang signifikan bagi PAD kota Bandung.

Penelitian yang dilakukan (Qadarrahman, 2010) salah satu upaya untuk meningkatkan penerimaan daerah yaitu dengan mengoptimalkan potensi dalam sektor pariwisata. Keterkaitan industri pariwisata dengan penerimaan daerah berjalan melalui jalur PAD dan bagi hasil pajak atau bukan pajak. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda dengan

penerimaan daerah sektor pariwisata sebagai variabel dependen dan empat variabel independen yaitu variabel jumlah obyek wisata, jumlah wisatawan, tingkat hunian hotel dan pendapatan perkapita. Secara parsial variabel jumlah obyek wisata, jumlah wisatawan dan tingkat hunian hotel berpengaruh signifikan. Sedangkan variabel pendapatan perkapita tidak signifikan. Dan dari keempat variabel tersebut yang paling dominan pengaruhnya terhadap penerimaan daerah dari sektor pariwisata di Kota Semarang adalah variabel jumlah obyek wisata. Dengan nilai t-hitung sebesar 4,407 dan probabilitas signifikansi sebesar 0,001.

Suhendi (2008) Penelitian ini membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak hotel dan restoran di Kota Yogyakarta selama 15 tahun observasi yaitu dari tahun 1991 sampai dengan 2005. Data yang digunakan merupakan data sekunder, berasal dari data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kantor Pelayanan Pajak Daerah (KPPD) Kota Yogyakarta.

Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu produk domestik regional bruto, jumlah wisatawan manca negara, jumlah penduduk, jumlah penginapan atau hotel di Kota Yogyakarta. Metode analisis yang digunakan adalah regresi log-linier.

Berdasarkan uji t, variabel Produk Domestik Regional Bruto secara statistik terbukti tidak signifikan terhadap penerimaan pajak hotel dan restoran di Kota Yogyakarta, hal ini dikarena tidak stabilnya sektor-sektor pendukung pesatnya kinerja perekonomian di Kota Yogyakarta. Variabel wisatawan nusantara berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak hotel dan restoran, sesuai dengan hipotesis yang ditetapkan. Variabel jumlah penduduk terbukti signifikan

secara negatif, hal ini diduga karena penduduk atau masyarakat Yogyakarta dengan mudahnya dapat menjangkau tempat-tempat pariwisata yang ada di Kota Yogyakarta dan tidak membutuhkan waktu yang lama untuk berlibur, sehingga masyarakat tidak perlu bermalam atau menginap di hotel atau penginapan serta jumlah penginapan atau hotel secara statistik terbukti secara signifikan sesuai dengan hipotesis yang ditetapkan.

Astuti (2006) juga melakukan penelitian untuk menganalisis pengaruh jumlah wisatawan, PDRB, dan jumlah penduduk secara individu maupun bersama-sama berpengaruh terhadap Pajak Hotel Restoran di Kota Surakarta. Penelitian ini menjelaskan bahwa PDRB, Jumlah Penduduk dan jumlah wisatawan berpengaruh terhadap penerimaan pajak hotel dan restoran-restoran. Data yang digunakan adalah data sekunder dimana dengan data tahun 1990-2005. Sedangkan alat yang digunakan adalah analisa regresi linier berganda. Hasil analisa menunjukkan bahwa dengan tingkat kepercayaan 95 persen, didapatkan hasil bahwa faktor PDRB berpengaruh terhadap Pajak Hotel dan Restoran pada Kota Surakarta secara individual. Demikian juga untuk faktor jumlah wisatawan ternyata juga berpengaruh terhadap pajak hotel dan restoran secara individual. Uji-F menunjukkan variabel jumlah wisatawan, PDRB, dan jumlah penduduk berpengaruh terhadap pajak hotel dan restoran pada Kota Surakarta secara bersama-sama. Koefesien determinasi R^2 , di peroleh nilai R Square adalah 0,971. Hal ini menunjukkan bahwa variabel pajak hotel dan restoran benar-benar dijelaskan oleh jumlah wisatawan, PDRB, dan jumlah penduduk sebesar 97,1 persen. Selebihnya dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar penelitian ini.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sumber data

Data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari suatu lembaga tertentu. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah bentuk data time series selama periode 2001 – 2010. Data ini diperoleh dari literatur dan laporan yang erat relevansinya terhadap penelitian.

3.2 Operasional Variabel

a. Penerimaan Pajak Restoran (Y)

Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga atau katering. Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan restoran dengan pembayaran. Subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada restoran. Wajib pajak restoran adalah pengusaha restoran. Tarif yang ditetapkan paling tinggi 10 persen dan disesuaikan dengan perda daerah tersebut. Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah penerimaan pajak restoran di Kota Padang tahun 2001-2010.

b. PDRB (X_1)

Indikator pertumbuhan ekonomi suatu wilayah untuk daerah tingkat provinsi atau kabupaten adalah PDRB, PDRB adalah keseluruhan nilai barang dan jasa yang diproduksi di dalam suatu daerah tertentu dalam satu tahun tertentu. PDRB yang dimaksud adalah laju PDRB atas dasar konstan (2000) di Kota Padang tahun 2001-2010 (dalam jutaan rupiah).

c. Jumlah Penduduk (X_2)

Jumlah penduduk merupakan banyaknya penduduk yang bertempat tinggal pada suatu daerah. Dalam penelitian ini menggunakan jumlah penduduk yang ada di Kota Padang selama kurun waktu 2001-2010.

d. Jumlah Kunjungan Wisatawan (X_3)

Wisatawan merupakan orang yang melakukan kegiatan pariwisata, sedangkan pariwisata mempunyai arti yaitu perjalanan penuh mulai dari berangkat dari suatu tempat ke satu atau berbagai tempat lain dan singgah kemudian kembali ke tempat semula dengan tujuan melakukan wisata pada tempat-tempat yang dikatakan sebagai objek wisata. Jumlah kunjungan wisatawan yang digunakan dalam penelitian ini adalah jumlah kunjungan wisatawan di Kota Padang dari tahun 2001-2010.

3.3 Metode Analisa Data

Untuk mengetahui yang mempengaruhi penerimaan pajak restoran di Kota Padang penulis menggunakan persamaan regresi linear berganda (*multiple linear regression*) yaitu suatu model dimana variabel tak bebas tergantung pada dua atau lebih variabel yang bebas (Firdaus, 2004). Variable terikat (*dependent variable*)

dalam penelitian ini adalah permintaan pembiayaan konsumtif dan sebagai variable bebas (*independent variable*) adalah PDRB, inflasi, bagi hasil, dan suku bunga sehingga dapat di tulis sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \mu \dots \dots \dots (3.1)$$

Dimana:

- Y = Penerimaan Pajak Restoran
- X₁ = PDRB
- X₂ = Jumlah Penduduk
- X₃ = Jumlah kunjungan Wisata
- β₀ – β₃ = Koefisien masing-masing variabel
- μ = Kesalahan Penganggu

Melihat persamaan di atas, maka persamaan dirubah dalam bentuk Double Log Transformation. Double Log Transformation dipakai untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh masing-masing variabel independen dalam bentuk persentase terhadap variabel dependen, maka persamaannya dijadikan dalam bentuk log. Sehingga persamaan di atas dapat dirubah menjadi. (Gujarati, 2003)

$$\text{Log } Y = \alpha_0 + \text{Log} X_1 + \text{Log} X_2 + \text{Log} X_3 + \mu \dots \dots \dots (3.2)$$

Dimana:

- Log Y = Penerimaan Pajak Restoran
- Log X₁ = Produk Domestik Regional Bruto
- Log X₂ = Jumlah Penduduk
- Log X₃ = Jumlah Kunjungan Wisatawan
- α₀ – α₃ = koefisien regresi
- μ = Kesalahan pengganggu

3.4 Pengujian Asumsi Klasik

3.4.1 Uji Normalitas

Uji normalitas adalah pengujian tentang kenormalan distribusi data. Penggunaan uji normalitas karena pada analisis statistik parametik, asumsi yang harus dimiliki oleh data adalah bahwa data tersebut harus terdistribusi secara normal. Menurut Gujarati (2003) uji normalitas terdiri dari tiga prosedur pengujian yaitu:

a. Histogram residu

Histogram residu merupakan perangkat grafik sederhana yang digunakan untuk mempelajari sesuatu tentang bentuk fungsi kepadatan probabilitas dari suatu variabel acak. data dikatakan normal jika bentuk kurva memiliki kemiringan yang cenderungimbang baik sisi kiri maupun sisi kanan dan kurva berbentuk lonceng yang hampir sempurna.

b. Gambar Probabilitas Normal

Gambar probabilitas normal menggunakan kertas distribusi normal pada sumbu horizontal (sumbu X) menggambarkan nilai variabel yang diamati, dan pada sumbu vertikal (sumbu Y) menunjukkan nilai harapan dari variabel ini seandainya distribusinya normal. Oleh karena itu, jika variabel yang diamati sesungguhnya berasal dari populasi normal, maka gambar probabilitas normal akan mendekati garis lurus.

c. Uji Jarque-Bera

Uji ini mula-mula menghitung koefisien kemencengan (skewness) dan peruncingan (kurtosis). Untuk variabel yang didistribusikan secara normal jika nilai skewness dan kurtosis adalah nol.

3.4.2 Multikolinearitas

Menurut Firdaus (2004) istilah multikolinearitas mula-mula dikemukakan oleh Ragnar Fisher yang mempunyai arti hubungan linier sempurna antar variabel, variabel independen dalam suatu model regresi.

Hal-hal utama yang sering menyebabkan terjadinya multikolinieritas pada model regresi, antara lain:

- a. Kesalahan teoritis dalam pembentukan model fungsi regresi yang dipergunakan.
- b. Terlampau kecilnya jumlah pengamatan yang akan dianalisis dengan model regresi. Telah diketahui bahwa kesalahan pertama didalam pekerjaan ekonometrika adalah, masalah kecilnya jumlah data yang dipergunakan.

Akibat yang ditimbulkan dari multikolinieritas sebagai berikut:

1. Walau koefisien regresi dari variabel X dapat ditentukan (determinate), tetapi standar errornya akan cenderung membesar nilainya sewaktu tingkat kolinearitas antara variabel bebas juga meningkat.
2. Oleh karena nilai standar error dari koefisien regresi besar maka interval keyakinan untuk parameter dari populasi juga cenderung melebar.
3. Dengan tingginya tingkat kolinearitas, probabilitas untuk menerima hipotesis, padahal hipotesis itu salah menjadi membesar nilainya.

4. Bila kolinearitas ganda tinggi, seseorang akan memperoleh nilai R^2 yang tinggi tetapi tidak ada atau sedikit sekali koefisien regresi yang signifikan secara statistik.

Cara mengetahui ada tidaknya kolineritas ganda dapat diketahui dengan ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Kolinearitas sering dapat diduga jika R^2 cukup tinggi (antara 0,7-1) dan jika koefisien korelasi sederhana juga tinggi, tetapi tak satupun atau sedikit sekali koefisien regresi parsial yang signifikan secara individu. Di pihak lain, uji F menolak H_0 yang mengatakan bahwa secara simultan seluruh koefisien regresi parsial nilainya nol.
- b. Meskipun koefisien korelasi sederhana nilainya tinggi sehingga timbul dugaan bahwa terjadi multikolinearitas, tetapi dalam hal ini belum tentu berlaku.
- c. Untuk mengetahui ada tidaknya multikolinearitas dalam suatu model regresi berganda, kita sarankan tidak hanya melihat koefisien korelasi sederhana, tetapi juga koefisien parsial.
- d. Oleh karena kolinearitas timbul disebabkan adanya satu atau lebih variabel bebas yang berkorelasi sempurna dengan variabel bebas lainnya, salah satu caranya ialah dengan membuat regresi setiap X_i terhadap sisa variabel lainnya dan menghitung R^2 yang cocok dan kita beri simbol R_i^2 .

3.4.3 Autokorelasi

Uji autokorelasi merupakan hubungan diantara anggota observasi dalam waktu (*time seires*) cara yang dapat untuk mendeteksi terjadinya autokorelasi,

dapat dilakukan dengan melihat pada table DW (Durbin Watson). Pengambilan keputusan didasari pada:

- Tidak terjadi autokorelasi jika $dU < DW < (4-dU)$
- Terjadi autokorelasi positif jika $DW < dL$
- Terjadi autokorelasi negatif jika $DW > (4dU)$
- Tanpa keputusan jika $dL < DW < dU$ atau $(4-dU) < DW < (4-dL)$

Untuk melihat ada tidaknya autokorelasi, dapat juga digunakan ketentuan sebagai berikut.

DW	Kesimpulan
Kurang dari 1,10	Ada autokorelasi
1,10 dan 1,54	Tanpa kesimpulan
1,55 dan 2,46	Tidak ada autokorelasi
2,46 dan 2,90	Tanpa kesimpulan
Lebih dari 2,91	Ada autokorelasi

Sumber: Firdaus, 2004

3.4.4 Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas adalah suatu kesalahan dimana masing-masing kesalahan pengganggu mempunyai varian yang berlainan, akibatnya penaksiran OLS tetap tidak bias tetapi tidak efisien, untuk menaksir ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan menggunakan uji korelasi Rank Sperman adalah sebagai berikut:

- Buatlah model regresinya: $Y_i = B_1 + B_2X_{2i} + B_3X_{3i} + B_4X_4 + \varepsilon_i$
- Carilah nilai-nilai variabel gangguan penduga ε_i

- c. Rangkings nilai-nilai e_i itu serta nilai-nilai e_i serta nilai-nilai X_1 yang bersangkutan dalam urutan yang semakin kecil atau semakin besar.
- d. Hitunglah koefisien regresi penduga Rank Spearman r_s dengan rumus:

$$r_s = 1 - \frac{6 \sum_{i=1}^n d_i^2}{n(n^2 - 1)}$$

Dimana:

d_i menunjukkan perbedaan setiap pasang rank

n menunjukkan jumlah pasang rank

- e. Bila r_s mendekati ± 1 maka kemungkinan besar terdapat heteroskedastisitas heteroskedastisitas dalam model itu, sedangkan bila r_s mendekati 0 maka kemungkinan adanya heteroskedastisitas kecil.

Jika model regresinya menyangkut lebih dari dua variabel maka langkah-langkah itu dipergunakan bagi setiap pasangan nilai e_i dan variabel bebas yang ada. Jadi, jika ada empat variabel bebas (X_1, X_2, X_3, X_4) maka akan diperoleh empat koefisien korelasi (Firdaus, 2004).

3.5 Uji Hipotesis Statistik

Pengujian hipotesis statistik dalam penelitian ini meliputi pengujian hipotesis secara parsial (uji-t), pengujian hipotesis secara simultan (uji-F), dan koefisien determinasi.

3.5.1 Uji F (F-test)

Uji F menunjukan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Artinya apakah semua variabel penjelas secara bersamaan merupakan variabel-variabel yang signifikan atau tidak signifikan terhadap variabel dependennya (Gujarati, 2003).

Secara statistik formulasi uji F adalah:

$$F = \frac{R^2 / (k-1)}{(1-R^2) / (n-k)}$$

Dimana :

R^2 = Koefisien determinasi

k = Jumlah koefisien variable

n = Jumlah observasi

Dengan hipotesis:

- Jika F-hitung > F-Tabel maka H_0 di tolak, Artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel X terhadap variabel Y.
- Jika F-hitung < F-Tabel maka H_0 diterima, Artinya terdapat pengaruh yang tidak signifikan antara variabel X terhadap variabel Y.

3.5.2 Uji t (t-test)

Uji t pada dasarnya adalah menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas secara individual mempengaruhi variabel terikat (Gujarati, 2003).

Nilai t-hitung dapat diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

$$t = \frac{\beta_i}{Se(\beta_i)}$$

Di mana :

β_i = Parameter yang ditaksir

Se = Standar error

Dengan membandingkan t-hitung dan t-tabel maka dapat dilihat signifikan atau tidaknya hasil koefisien regresi. Nilai t-hitung selanjutnya dibandingkan dengan nilai t-tabel pada derajat kebebasan (df) dengan tingkat keyakinan tertentu dengan keputusan sebagai berikut:

t- hitung > t- tabel $\longrightarrow$ H_0 ditolak dan menerima H_1

t- hitung < t- tabel $\longrightarrow$ H_0 diterima dan menolak H_1

BAB IV

GAMBARAN UMUM KOTA PADANG

4.1. Deskripsi Objek Penelitian

4.1.1. Keadaan Geografis

Kota Padang adalah Ibu Kota Propinsi Sumatera Barat yang terletak di pantai barat pulau Sumatera dan berada antara $0^{\circ} 44' 09''$ Bujur Timur. Menurut PP No. 17 Tahun 1980, luas Kota Padang adalah $694,96 \text{ km}^2$ atau setara dengan 1,65 persen dari luas Propinsi Sumatera Barat. Kota Padang terdiri dari 11 kecamatan dengan kecamatan terluas adalah Koto Tangah yang mencapai $232,25 \text{ km}^2$.

Dari keseluruhan luas Kota Padang sebagian besar atau 51,01 persen berupa hutan yang dilindungi oleh pemerintah. Berupa bangunan dan pekarangan seluas $51,08 \text{ km}^2$ atau 7,35 persen. Selain daratan pulau Sumatera Kota Padang memiliki 19 pulau dimana yang terbesar adalah Pulau Bintangur seluas 56,78 ha, kemudian Pulau Sikuai di Kecamatan Bungus Teluk Kabung seluas 48,12 ha dan Pulau Toran di Kecamatan Padang Selatan seluas 33,67 ha. (Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Padang, Padang dalam Angka Tahun 2010)

4.1.2. Penduduk dan Luas Wilayah

Jumlah penduduk Kota Padang pada tahun 2010 adalah 833.562 jiwa. Penyebaran penduduk Kota Padang dimana penduduk yang paling banyak adalah di kecamatan Koto Tangah yaitu 162.079 jiwa. Tingginya tingkat

penyebaran penduduk di kecamatan ini ditandai dengan banyaknya pembangunan perumahan baik yang dilakukan oleh perusahaan pengembang maupun oleh perorangan.

Namun demikian Kecamatan Padang Timur masih menjadi Kecamatan dengan tingkat kepadatan paling tinggi yaitu 9.554 jiwa, di ikuti dengan Kecamatan Padang Utara sebanyak 8.554 jiwa dan Kecamatan Nanggalo sebanyak 7.097 jiwa.

Tabel 4.1
Luas Wilayah, Rumah Tangga, Penduduk dan Kepadatan Penduduk
Kota Padang Tahun 2010

Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Rumah Tangga	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Kepadatan
Padang Timur	8.15	18.721	38.650	39.218	96.597,15	9.554
Padang Utara	8.08	18.361	32.732	36.387	87.488,08	8.554
Nanggalo	8.07	13.298	27.774	29.501	70.581,07	7.097
Jumlah	24.30	50.380	99.156	95.106	254.666,3	25.205

Sumber: BPS Kota Padang, Padang dalam Angka 2010

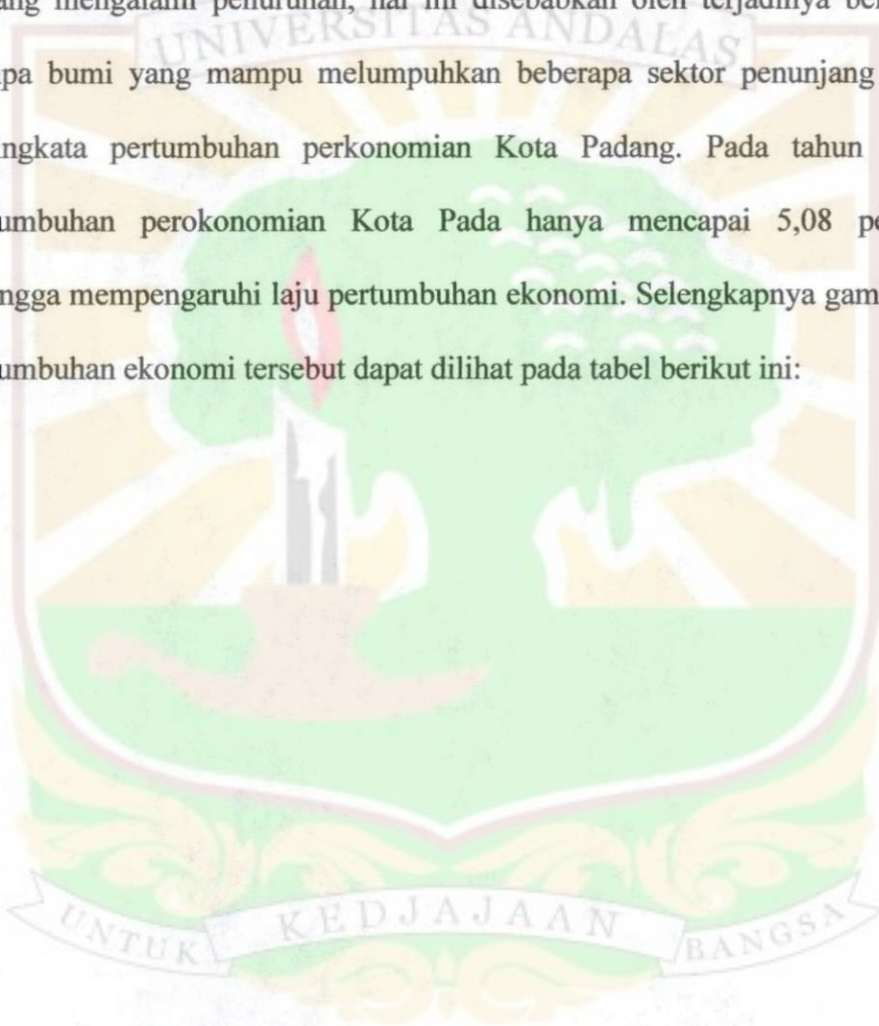
4.2. Analisis Data

4.2.1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang sering dipakai untuk mengukur kinerja kegiatan ekonomi makro dan kesejahteraan umum suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi mencerminkan terjadinya

ekspansi kegiatan ekonomi, baik secara keseluruhan sektor maupun secara parsial satu sektor ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi Kota Padang selama priode 2007-2010 mengalami peningkatan yang efektif cukup tinggi, dimana secara rata-rata mencapai 5,96 persen. Namun pada priode 2009 pertumbuhan ekonomi Kota Padang mengalami penurunan, hal ini disebabkan oleh terjadinya bencana gempa bumi yang mampu melumpuhkan beberapa sektor penunjang akan peningkata pertumbuhan perkonomian Kota Padang. Pada tahun 2009 pertumbuhan perokonomian Kota Pada hanya mencapai 5,08 persen, sehingga mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi. Selengkapnya gambaran pertumbuhan ekonomi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:



Tabel 4.2
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Padang
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2007-2010

	Pertumbuhan Ekonomi (%)			
	2007	2008	2009	2010
1. PERTANIAN	5,55	5,96	5,47	5,03
a. Tanaman Pangan & Holtikultura	5,70	5,73	5,56	6,04
b. Tanaman Perkebunan	5,39	5,27	5,13	5,66
c. Peternakan & Hasil-hasilnya	3,40	3,93	3,74	4,52
d. Kehutanan	0,08	1,00	1,02	1,21
e. Perikanan	6,14	6,70	5,93	4,70
2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN	6,42	5,80	4,97	6,84
a. Pertambangan Tanpa Migas	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Penggalian	6,42	5,80	4,97	6,84
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	4,89	4,80	3,76	4,54
a. Industri Migas				
b. industri Tanpa Migas	4,89	4,80	3,76	4,54
4. LISTRIK GAS DAN AIR BERSIH	10,19	8,58	6,28	5,61
a. Listrik	10,63	8,79	6,38	5,59
b. Gas				0,00
c. Air Bersih	6,11	6,54	5,27	5,82
5. BANGUNAN	6,58	6,51	4,82	7,52
6. PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN	5,33	4,54	3,44	4,63
a. perdagangan Besar & Eceran	5,35	4,53	3,44	4,63
b. Hotel	4,44	4,90	3,13	4,71
c. restoran	4,68	5,06	3,42	5,11
7. PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI	7,20	8,13	6,93	7,98
a. Angkutan	4,70	5,22	4,70	5,27
1. Angkutan Kereta Api	6,91	7,99	5,87	5,89
2. Angkutan Jalan Raya	4,84	5,06	4,78	4,96
3. Angkutan Laut	3,01	5,46	4,16	4,26
4. ASDP	2,97	2,86	2,14	2,36
5. Angkutan Udara	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Jasa Penunjang Angkutan	5,62	5,67	5,16	5,21
b. Komunikasi	12,94	14,31	11,29	11,33
8. KEU, PERSEWAAN & JASA USAHA	7,62	7,25	5,98	6,68
a. Bank	8,37	7,51	5,17	7,72
b. Lembaga Keuangan Tanpa Bank & Jasa penunjang	10,85	9,72	7,66	6,11
c. Sewa Bangunan	5,10	5,52	5,87	6,14
d. Jasa Perusahaan	4,41	4,96	4,12	5,67
9. JASA-JASA	5,95	6,41	5,24	5,55
a. Pemerintahan Umum & Pertahanan	5,26	6,46	4,85	4,86
b. Swasta	6,63	6,36	5,60	6,57
1. Sosial Kemasyarakatan	6,29	6,24	6,27	6,39
2. Hiburan & Rekreasi	6,44	5,91	6,08	7,47
3. Perorangan & Rumah tangga	7,07	6,70	4,69	3,52
Total	6,14	6,21	5,08	5,96

Sumber : Data Diolah, BPS Kota Padang,

pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin.

Terjadinya penurunan Pendapatan Asli Daerah pada priode tahun 2010 sebesar 7,66 persen, ini disebabkan dengan terjadinya bencana yang tidak terduga yaitu terjadinya gempa bumi, yang mampu melumpuhkan hampir seluruh sektor penunjang peningkatan Pendapatan asli daerah Kota Padang.

4.2.3. Perkembangan Penerimaan Pajak Restoran di Kota Padang

Pelaksanaan otonomi daerah menimbulkan berbagai harapan baik bagi masyarakat, swasta bahkan pemerintah sendiri. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Daerah, terutama Kabupaten dan atau Kota dalam menjalankan kebijakan otonominya. Disinilah perlunya mengidentifikasi berbagai dimensi atau faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah.

Otonomi yang telah diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan melakukan pengelolaan sendiri terhadap potensi-potensi daerah. Dengan kinerja yang baik pemerintah daerah pasti bisa memaksimalkan pendapatan daerah tersebut, dimana dalam aplikasinya PAD tersebut juga digunakan untuk mengatur dan membiayai kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, terutama dalam memaksimalkan pendapatan dari sektor pajak. (Tim Kajian Kinerja Otonomi Daerah, 2012)

Pajak restoran merupakan salah satu penyumbang dari PAD bagi suatu daerah untuk melakukan kegiatan mengatur dan pembiayaan dari daerah tersebut, pajak restoran merupakan pajak yang dikenakan atas pelayanan yang

disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga atau katering. (UU No. 28 Tahun 2009)

Tabel 4.4
Perkembangan Penerimaan Pajak Restoran
Kota Padang Tahun 2001-2010

Tahun	Target	Realisasi	Capaian Realisasi (%)
2001	2.000.000.000	2.026.069.151	-
2002	2.200.000.000	2.256.887.156	11,39
2003	2.500.000.000	2.564.644.495	13,64
2004	3.600.000.000	3.911.645.335	52,52
2005	4.500.000.000	4.744.157.855	21,28
2006	5.300.000.000	5.870.169.164	23,73
2007	5.700.000.000	5.941.469.847	1,21
2008	8.000.000.000	8.247.380.757	38,81
2009	8.500.000.000	7.596.772.297	-7,89
2010	5.771.673.570	6.922.766.148	-8,87
Capaian Realisasi Rata-Rata			14,58%

Sumber: DPKA Kota Padang

Tabel 4.5
Realisasi dan Pertumbuhan Penerimaan Pajak
Restoran di Kota Padang 2001-2010

Tahun	Realisasi	Pertumbuhan (%)
2001	2.026.069.151	-
2002	2.256.887.156	11,39
2003	2.564.644.495	13,64
2004	3.911.645.335	52,52
2005	4.744.157.855	21,28
2006	5.870.169.164	23,73
2007	5.941.469.847	1,21
2008	8.247.380.757	38,81
2009	7.596.772.297	-7,89
2010	6.922.766.148	-8,87
Pertumbuhan Rata-Rata		16,20%

Sumber: DPKA Kota Padang

Dilihat dari perkembangan realisasi pajak restoran menurut tabel di atas menunjukkan bahwa terjadinya peningkatan dari tahun ke tahun namun, pada tahun 2008 sampai pada tahun 2010 adanya suatu penurunan yang sangat berarti yaitu dari 8.247.380.757, 7.596.772.297, sampai pada angka 6.922.766.148. Hal ini di sebabkan oleh gempa yang terjadi pada tahun 2009

menyebarkan kelapisan masyarakat serta siapa yang telah menikmati hasil-hasilnya. Sehingga menurunnya PDRB suatu daerah berdampak pada kualitas konsumsi rumah tangga. Dan apabila tingkat pendapatan penduduk sangat terbatas, banyak rumah tangga miskin terpaksa merubah pola makanan pokoknya ke barang paling murah dengan jumlah barang yang berkurang.

Pendapatan per kapita memberikan gambaran tentang laju pertumbuhan kesejahteraan masyarakat diberbagai negara dan juga dapat menggambarkan perubahan corak perbedaan tingkat kesejahteraan masyarakat yang sudah terjadi

Di antara berbagai negara menurut Lincolin Arsyad dalam Sukmaraga, (2011) Semakin tinggi tingkat pendapatan seseorang maka akan semakin tinggi pula kemampuan seseorang untuk membayar berbagai pungutan yang ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini berarti juga semakin tinggi PDRB per kapita semakin sejahtera penduduk suatu wilayah, dengan kata lain jumlah penduduk miskin akan berkurang.

Pertumbuhan ekonomi yang terjadi setiap tahunnya tidak lepas dari perkembangan masing-masing faktor atau sub sektor yang ikut membentuk nilai tambah perekonomian suatu daerah dan merupakan dampak nyata dari suatu kondisi yang terjadi tiap tahunnya.

Tabel 4.6
Nilai dan Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000
Kota Padang Tahun 2001-2010

Tahun	Jumlah PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000 (Juta Rupiah)	Pertumbuhan (%)
2001	7.353,09	-
2002	7.742,46	5,30
2003	8.171,84	5,55
2004	8.652,90	5,89
2005	9.110,70	5,29
2006	9.579,00	5,14
2007	10.165,76	6,13
2008	10.797,26	6,21
2009	11.345,64	5,08
2010	12.021,60	5,96
Pertumbuhan Rata-Rata		5,61%

Sumber: BPS Kota Padang

Selama periode ini dalam kurun waktu (2001-2010), pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan 2000 di Kota Padang, PDRB terendah terjadi pada tahun 2009 yaitu sebesar 5,08 persen dan tertinggi pada tahun 2008 yaitu sebesar 6,21 persen dengan laju pertumbuhan rata-rata PDRB atas dasar harga konstan mencapai pertumbuhan sebesar 5,61 persen pertahun. Pertumbuhan kontribusi sektor lapangan usaha terhadap total PDRB nya ini dapat kita pahami dengan melihat tabel 4.7.

Bencana gempa tersebut juga menyebabkan penurunan akan penerimaan dari usaha perdagangan, hotel dan restoran. Pada tahun sebelumnya 2009 penerimaan dari sektor perdangan, hotel dan restoran mencapai 21,78 persen dan menurun menjadi 21,44 persen. Sehingga pada tahun tersebut sektor perdangan, hotel dan restoran tidak berpengaruh besar terhadap tingkat PDRB Kota Padang.

4.2.5. Kependudukan Kota Padang

Penduduk adalah orang-orang yang berada di dalam suatu wilayah yang terikat oleh aturan-aturan yang berlaku dan saling berinteraksi satu sama lain secara terus menerus atau kontinu. Dalam sosiologi, penduduk adalah kumpulan manusia yang menempati wilayah geografi dan ruang tertentu. Penduduk suatu negara atau daerah bisa didefinisikan menjadi dua:

- Orang yang tinggal di daerah tersebut
- Orang yang secara hukum berhak tinggal di daerah tersebut. Dengan kata lain orang yang mempunyai surat resmi untuk tinggal di situ. Misalkan bukti kewarga negaraan, tetapi memilih tinggal di daerah lain.

Kita telah mengetahui bahwa faktor penduduk merupakan faktor dominan yang akan menentukan pertumbuhan ekonomi. Penduduk bisa bertindak sebagai tenaga kerja dalam proses produksi dan yang lebih penting bahwa penduduk bisa bertindak sebagai unsur yang dapat menciptakan dan mengembangkan teknologi. (Lucihuki, 2011)

Kota Padang merupakan kota yang cukup padat dan merupakan ibu kota dari Provinsi Sumatera Barat. Dimana perkembangan jumlah penduduk

Sedangkan untuk jumlah pencari kerja yang terdaftar menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan dapat kita lihat pada tabel 4.9 sebagai berikut:

Tabel 4.9
Jumlah Pencari Kerja yang Terdaftar Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan Kota Padang Tahun 2010

Pendidikan yang Ditamatkan	Terdaftar			Di Tempatkan Pada Tahun Ini		
	L	P	Jumlah Total	L	P	Jumlah Total
SD	10	42	52	0	0	0
SLTP	53	142	195	0	70	70
SLTA	3.691	3.260	6.951	75	324	399
D1 dan D2	31	130	161	10	45	55
D3	605	1.297	1.902	59	164	223
Sarjana	1.714	2.970	4.684	126	210	336
Jumlah Total	6.104	7.841	13.945	270	813	1.083

Sumber: BPS Kota Padang

Jumlah pencari kerja yang terdaftar pada tahun 2010 dari berbagai tingkatan jenjang pendidikan berjumlah 1.3945 orang. Angka ini jauh mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2009 sebesar 16.410 para pencari kerja. Dari jumlah tersebut yang berhasil ditempatkan sebanyak 1.083 orang dengan rincian 270 orang laki-laki dan 813 orang perempuan.

4.2.6. Perkembangan Kunjungan Wisatawan di Kota Padang

Pariwisata seringkali dipersepsikan sebagai mesin penggerak ekonomi atau penghasil devisa bagi pembangunan ekonomi di suatu Negara, tanpa terkecuali di Indonesia. Namun demikian pada kenyataannya, pariwisata memiliki spektrum fundamental pembangunan yang lebih luas bagi suatu negara.

Menurut Departemen Kebudayaan dan Pariwisata RI dalam Utama (2011) menjelaskan bahwa pembangunan kepariwisataan pada dasarnya ditujukan untuk beberapa tujuan pokok yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Persatuan dan Kesatuan Bangsa

Pariwisata dianggap mampu memberikan perasaan bangga dan cinta terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui kegiatan perjalanan wisata yang dilakukan oleh penduduknya ke seluruh penjuru negeri. Dampak yang diharapkan, dengan banyaknya warganegara yang melakukan kunjungan wisata di wilayah-wilayah selain tempat tinggalnya akan menimbulkan rasa persaudaraan dan pengertian terhadap sistem dan filosofi kehidupan masyarakat yang dikunjungi sehingga akan meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan nasional.

b) Penghapusan Kemiskinan (Poverty Alleviation)

Pembangunan pariwisata diharapkan mampu memberikan kesempatan bagi seluruh rakyat Indonesia untuk berusaha dan bekerja. Kunjungan wisatawan ke suatu daerah diharapkan mampu

memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Harapannya adalah bahwa pariwisata harusnya mampu memberi andil besar dalam penghapusan kemiskinan di berbagai daerah yang miskin potensi ekonomi lain selain potensi alam dan budaya bagi kepentingan pariwisata.

c) Pembangunan Berkesinambungan (Sustainable Development)

Dengan sifat kegiatan pariwisata yang menawarkan keindahan alam, kekayaan budaya dan keramah tamahan dan pelayanan, sedikit sekali sumberdaya yang habis digunakan untuk menyokong kegiatan ini. Artinya penggunaan sumberdaya yang habis pakai cenderung sangat kecil sehingga jika dilihat dari aspek keberlanjutan pembangunan akan mudah untuk dikelola dalam waktu yang relative lama.

d) Pelestarian Budaya (Culture Preservation)

Pembangunan kepariwisataan diharapkan mampu berkontribusi nyata dalam upaya-upaya pelestarian budaya suatu negara atau daerah yang meliputi perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan budaya negara atau daerah. UNESCO dan UN-WTO dalam resolusi bersama mereka di tahun 2002 telah menyatakan bahwa kegiatan pariwisata merupakan alat utama pelestarian kebudayaan. Dalam konteks tersebut, sudah selayaknya bagi Indonesia untuk menjadikan pembangunan kepariwisataan sebagai pendorong pelestarian kebudayaan diberbagai daerah.

e) Pemenuhan Kebutuhan Hidup dan Hak Azasi Manusia: Pariwisata pada masa kini telah menjadi kebutuhan dasar kehidupan masyarakat modern. Pada beberapa kelompok masyarakat tertentu kegiatan melakukan perjalanan wisata bahkan telah dikaitkan dengan hak azasi manusia khususnya melalui pemberian waktu libur yang lebih panjang dan skema paid holidays.

f) Peningkatan Ekonomi dan Industri: Pengelolaan kepariwisataan yang baik dan berkelanjutan diharapkan mampu memberikan kesempatan bagi tumbuhnya ekonomi di suatu destinasi pariwisata. Penggunaan bahan dan produk lokal dalam proses pelayanan di bidang pariwisata akan juga memberikan kesempatan kepada industri lokal untuk berperan dalam penyediaan barang dan jasa.

g) Pengembangan Teknologi

Dengan semakin kompleks dan tingginya tingkat persaingan dalam mendatangkan wisatawan ke suatu destinasi, kebutuhan akan teknologi tinggi khususnya teknologi industri akan mendorong destinasi pariwisata mengembangkan kemampuan penerapan teknologi terkini mereka. Pada daerah-daerah tersebut akan terjadi pengembangan teknologi maju dan tepat guna yang akan mampu memberikan dukungan bagi kegiatan ekonomi lainnya. Dengan demikian pembangunan kepariwisataan akan memberikan manfaat bagi masyarakat dan pemerintahan di berbagai daerah yang lebih luas dan bersifat fundamental. Kepariwisataan akan menjadi bagian

Padang mengalami perbaikan infrastruktur di dalam kepariwisataan sehingga mampu membuat wisatawan tertarik untuk mengunjungi objek-objek wisata yang ada di Kota Padang. Sedangkan pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2004 yaitu sebesar 4,20 persen dengan total jumlah wisatawan berkisar 1.006.655 orang wisatawan, hal ini disebabkan oleh tahapan sosialisasi dengan berlakunya perda yang baru tentang pajak dan retribusi di Kota Padang. Rata-rata pertumbuhan setiap tahunnya dalam kurun waktu 2001-2010 adalah 4,61 persen.

Tabel 4.11
Jumlah Wisatawan Domestik dan Asing yang
Berkunjung di Kota Padang Tahun 2001-2010

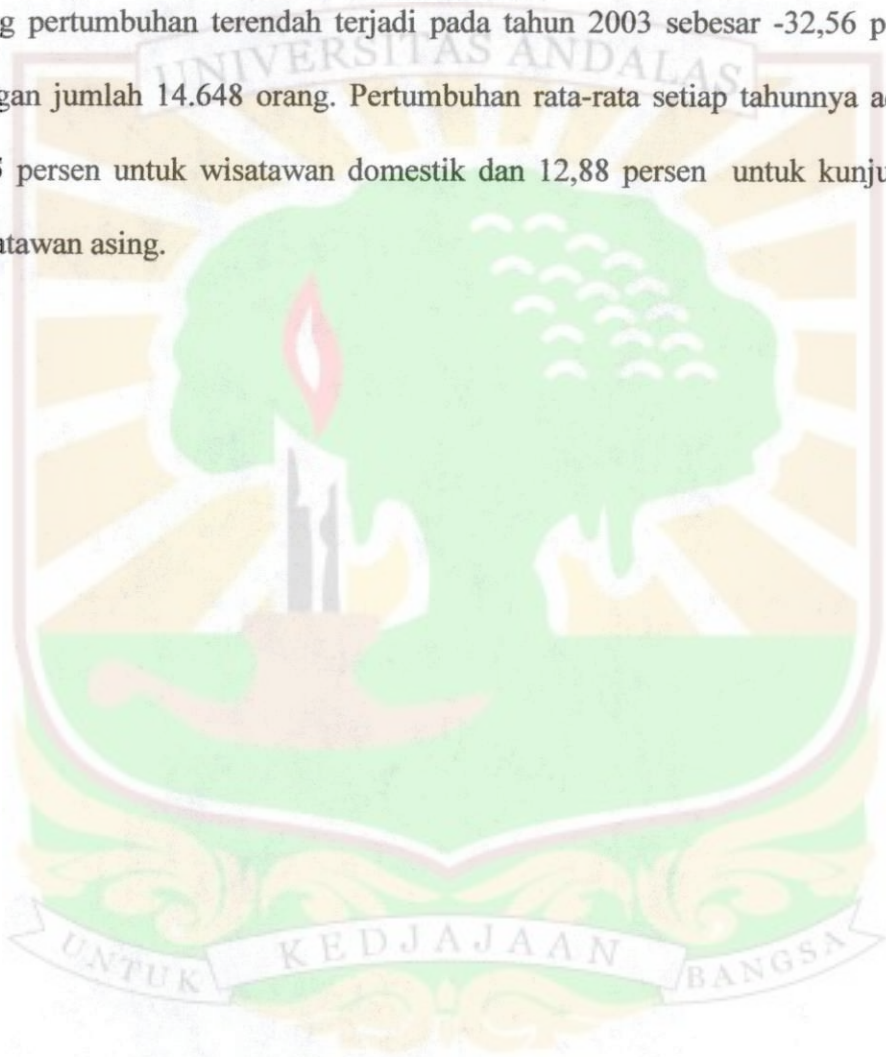
Tahun	Jumlah Wisatawan		Pertumbuhan Wisatawan Domestik (%)	Pertumbuhan Wisatawan Asing (%)
	Domestik	Asing		
2001	1.160.188	20.398	-	-
2002	1.243.714	21.720	7,20	6,48
2003	1.214.052	14.648	-2,38	-32,56
2004	995.523	17.132	-18,00	16,96
2005	1.038.874	28.182	4,35	64,49
2006	1.302.160	27.920	25,34	-0,93
2007	1.425.241	28.320	9,45	1,43
2008	1.593.725	42.028	11,82	48,40
2009	1.748.832	46.143	9,73	9,79
2010	1.823.401	47.002	4,26	1,86
Pertumbuhan Rata-Rata			5,75%	12,88%

Sumber: BPS Kota Padang

Tahun 2006 merupakan pertumbuhan wisatawan domestik yang sangat pesat yaitu sebesar 25,34 persen dan tahun 2005 merupakan pertumbuhan

wisatawan asing tertinggi dalam kunjungan wisatawan di Kota Padang yaitu sebesar 64,49 persen.

Sedangkan pertumbuhan terendah untuk kunjungan wisatawan domestik terjadi pada tahun 2004 yaitu sebesar -18,00 persen dengan total jumlah wisatawan yang berkunjung 995.523 orang. Namun untuk wisatawan asing pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2003 sebesar -32,56 persen dengan jumlah 14.648 orang. Pertumbuhan rata-rata setiap tahunnya adalah 5,75 persen untuk wisatawan domestik dan 12,88 persen untuk kunjungan wisatawan asing.



BAB V

ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan diuraikan hasil pengolahan data dan pembahasan hasil pengolahan data. Untuk analisa data, penulis menggunakan metode ekonometrik, yaitu regresi linear berganda dengan metode Enter. Metode Enter adalah memasukan semua prediktor ke dalam analisis sekaligus.

5.1 Analisa Data

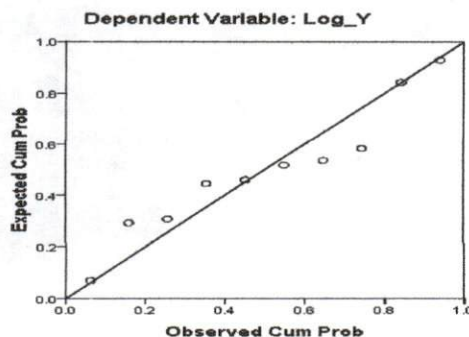
5.1.1 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik bertujuan agar output yang dihasilkan menjadi valid dan mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Beberapa uji asumsi klasik yang perlu dilakukan sebelum pengolahan data dengan menggunakan metode regresi berganda adalah uji, normalitas, multikolinearitas, autokorelasi, dan uji heterokedastisitas.

5.1.1.1 Uji Normalitas

Uji normalitas data dilakukan untuk mengetahui apakah variabel dalam penelitian ini telah terdistribusi secara normal. Uji normalitas data pada penelitian ini dapat dilihat pada gambar 5.1.

Gambar 5.1
Uji Normalitas
Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Pada gambar 5.1, dapat terlihat bahwa titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal. Sehingga dalam penelitian ini tidak terjadi gangguan normalitas, yang berarti data terdistribusi normal.

5.1.1.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas diperlukan untuk mengetahui ada tidaknya variable independen yang memiliki kemiripan dengan variable independen lain dalam satu model, yang dapat dilihat dari nilai *Tolerance* tidak kurang dari 0,1 dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) tidak lebih dari 10, maka model dapat dikatakan terbebas dari multikolinearitas.

Tabel 5.1
Uji Multikolinearitas

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Log_X1	.331	3.021
	Log_X2	.940	1.063
	Log_X3	.328	3.051

Uji multikolonieritas dengan uji nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF), hasilnya tampak seperti dalam tabel 5.1. Pada Tabel 5.1 dapat dilihat bahwa nilai angka tolerance dan nilai VIF adalah 0,477 dan 2,095 untuk variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Selanjutnya, untuk variable Inflasi nilainya adalah 0,836 dan 1,195, sedangkan nilai untuk variabel Bagi Hasil adalah 0,474 dan 2,112, dan nilai tolerance dan VIF untuk variable suku bunga adalah 0,427 dan 2,342. Nilai angka VIF dari keempat variabel dependen berada

dibawah angka 10 dan nilai tolerancinya tidak kurang dari 0,1. Hal ini membuktikan tidak ada terjadinya multikolinearitas pada penelitian ini.

5.1.1.3 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk melihat apakah terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu. Untuk mendeteksi terjadinya kasus autokorelasi, dapat dilakukan dengan melihat pada tabel DW (Durbin Watson). Hal ini dapat dilihat pada tabel 5.2.

Tabel 5.2
Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.961 ^a	.924	.885	.07637	1.585

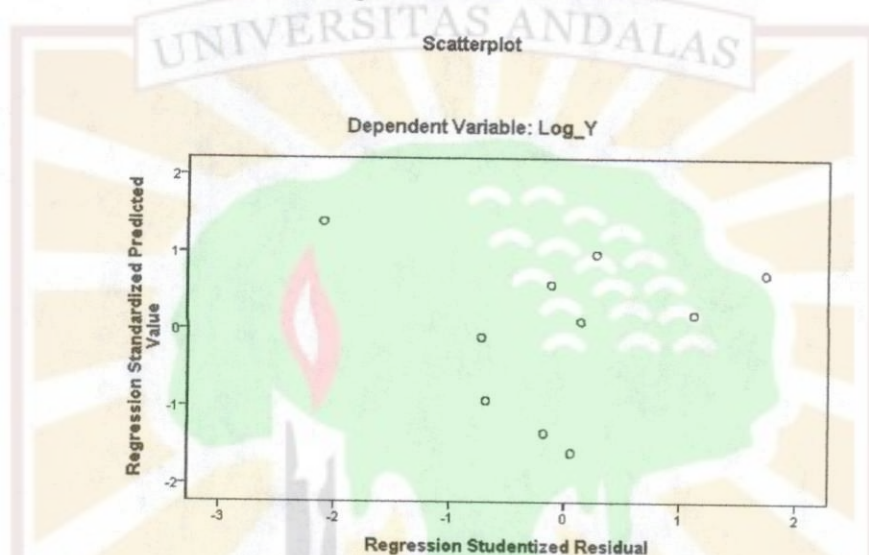
a. Predictors: (Constant), Log_X3, Log_X2, Log_X1

b. Dependent Variable: Log_Y

Pada Tabel diatas diperoleh nilai Durbin-Watson adalah sebesar 1,585 dan nilai ini akan dibandingkan dengan nilai tabel dengan menggunakan nilai signifikansi 5% , jumlah data 10 dan variable independen 3 ($k=3$). Sedangkan nilai du yang diperoleh dari tabel Durbin-Watson adalah $du=2,016$. Nilai Durbin-Watson sebesar 1,585, suatu model regresi dinyatakan tidak terkena kasus autokorelasi apabila $du < DW < 4-du$. Maka, dari hasil regresi dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi kasus autokorelasi, karena nilai DW yang didapatkan lebih besar dari nilai du dan lebih kecil dari $4-du$ ($0,525 < 1,585 < 4-2,016 = 1,984$).

Pengujian ada atau tidak adanya heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan uji grafik. Uji grafik untuk pengujian heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat grafik scatter plot dan hasilnya tampak seperti dalam gambar 5.2.

Gambar 5.2
Uji Heterokedastisitas



Pada Gambar diatas dapat dilihat bahwa sebaran data dalam *scatter plot* tidak membentuk suatu pola tertentu. Hal ini berarti bahwa tidak terjadi kasus heterokedastisitas dalam penelitian ini.

Memperhatikan hasil dari uji asumsi klasik diatas, dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini terbebas dari kasus asumsi klasik. Hal ini dikarenakan pada hasil penelitian ini, data sudah terdistribusi secara normal.

5.2 Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis yang dilakukan dengan metode enter, guna memperoleh model dengan komposisi variable yang signifikan terhadap permintaan pembiayaan konsumtif pada bank syariah.

5.2.1 Uji Simultan (F-test)

Uji pengaruh simultan bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen, uji ini menggunakan nilai F-test. Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan software SPSS diperoleh hasil nilai F-test seperti tampak dalam Tabel 5.3.

Tabel 5.3
Hasil Perhitungan Nilai F-test

ANOVA ^b						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.423	3	.141	24.197	.001 ^a
	Residual	.035	6	.006		
	Total	.458	9			

a. Predictors: (Constant), Log_X3, Log_X2, Log_X1

b. Dependent Variable: Log_Y

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 5.3 memperlihatkan bahwa nilai F- test adalah sebesar 24,197 dengan nilai signifikansi $0,001 < 0,05$. Nilai F – test sebesar 24,197 jauh lebih besar dari nilai F-tabel = 4,757 yang berarti bahwa variabel independen Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Jumlah Penduduk dan Jumlah Kunjungan Wisata secara simultan mempengaruhi variabel dependen yaitu Penerimaan Pajak Restoran di Kota Padang.

5.2.2 Uji Parsial (t-test)

Masing-masing variabel independen secara individual (parsial) mempengaruhi variabel dependen jika $t\text{-test} > t\text{-tabel}$, dan begitu sebaliknya masing-masing variabel independen secara individual (parsial) tidak mempengaruhi variabel dependen jika $t\text{-test} < t\text{-tabel}$ dengan tingkat kepercayaan 95%. Dalam penelitian ini dengan menggunakan tingkat signifikan 0,05 dengan

jumlah data 10 dan variabel independen 3, maka didapatkan nilai t_{tabel} sebesar 2,447.

Tabel 5.4
Hasil Perhitungan Nilai t – test

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-.884	1.721		-.513	.626
Log_X1	1.761	.627	1.175	5.994	.001
Log_X2	.690	.154	.021	4.481	.019
Log_X3	.710	.149	.286	4.765	.010

a. Dependent Variable: Log_Y

1. PDRB (LogX₁)

Pengujian yang pertama dilakukan terhadap variable PDRB, pengaruhnya terhadap Penerimaan Pajak Restoran dapat dilihat pada Tabel diatas. Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa PDRB memiliki nilai t-hitung sebesar 5,994 dengan signifikan sebesar 0,001 artinya PDRB berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Restoran, atau dapat dibandingkan dengan t-tabel yaitu sebesar 2,447 (df=6, $\alpha = 0.05$) jika dibandingkan dengan t-hitung maka 5,994 lebih besar dari t-table sebesar 2,446 sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima. Hal tersebut menunjukkan bahwa peningkatan Produk Domestik Regional Bruto Kota Padang, maka akan mempengaruhi Penerimaan Pajak Restoran.

2. Jumlah Penduduk (LogX₂)

Pengujian yang kedua dilakukan terhadap variable Jumlah Penduduk, pengaruhnya terhadap Penerimaan Pajak Restoran dapat dilihat pada Tabel

diatas. Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa Jumlah Penduduk memiliki nilai t-hitung sebesar 4,481 dengan signifikan sebesar 0,019 artinya Jumlah Penduduk berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Restoran, atau dapat dibandingkan dengan t-tabel yaitu sebesar 2,447 ($df=6$, $\alpha = 0,05$) jika dibandingkan dengan t-hitung 4,481 maka lebih besar dari t-tabel sebesar 2,447 sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima. Hal tersebut menunjukkan bahwa variable Jumlah Penduduk berpengaruh secara signifikan terhadap variable Penerimaan Pajak Restoran.

3. Jumlah Kunjungan Wisatawan ($\text{Log}X_3$)

Pengujian yang ketiga dilakukan terhadap variable Jumlah Kunjungan Wisatawan, pengaruhnya terhadap Penerimaan Pajak Restoran dapat dilihat pada Tabel diatas. Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa Jumlah Kunjungan Wisatawan memiliki nilai t-hitung sebesar 4,765 dengan signifikan sebesar 0,010 artinya Jumlah Kunjungan Wisatawan berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Restoran, atau dapat dibandingkan dengan t-tabel yaitu sebesar 2,447 jika dibandingkan dengan t-hitung maka 4,765 lebih besar 2,447 sehingga H_0 ditolak H_a diterima. Hal ini menunjukan bahwa variabel Jumlah Kunjungan Wisatawan berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Penerimaan Pajak Restoran di Kota Padang.

Berdasarkan dari tiga pembahasan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa hasil dari penelitian ini mendukung hipotesa yang telah ditetapkan dalam bab satu bahwa semua variabel (PDRB, Jumlah Penduduk, dan

Jumlah Kunjungan Wisatawan) berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan Penerimaan Pajak Restoran di Kota Padang.

5.3 Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien determinasi digunakan untuk menguji seberapa besar kemampuan variabel independen untuk menjelaskan variabilitas variabel dependen dalam model regresi. Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan software SPSS diperoleh hasil nilai koefisien determinasi seperti dalam Tabel 5.5.

Tabel 5.5
Hasil Perhitungan Nilai Koefisien Determinasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.961 ^a	.924	.885	.07637	1.585

a. Predictors: (Constant), Log_X3, Log_X2, Log_X1

b. Dependent Variable: Log_Y

Berdasarkan hasil perhitungan dalam Tabel 5.5 didapatkan nilai koefisien adjusted R² sebesar 0.885, yang berarti bahwa variabilitas dari variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabilitas dari variabel independen sebesar 88,5 persen. Sedangkan sisanya sebesar 11,5 persen dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak masuk dalam model regresi.

5.4 Persamaan Regresi

Berdasarkan uji parsial di atas pada table 5.4, persamaan atau model regresi yang terbentuk adalah sebagai berikut:

$$\text{Log Y} = -0,884 + 1,761 \text{ Log X1} + 0,690 \text{ Log X2} + 0,710 \text{ Log X3}$$

(5,994)

(4,481)

(4,765)

Dari model regresi di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Konstanta sebesar -0,884 menyatakan bahwa jika ada atau bernilai nol variabel independen (PDRB, jumlah penduduk dan jumlah kunjungan wisatawan) maka nilai Log Y (penerimaan pajak restoran) akan mengalami penurunan sebesar -0,884 atau berarti juga ada pengaruh faktor variabel lain diluar dari variabel independen penelitian yang mempengaruhi penerimaan pajak restoran.
2. Koefisiensi regresi LogX_1 (PDRB) sebesar 1,761 menyatakan bahwa setiap perubahan PDRB sebesar 1 persen akan menyebabkan penerimaan pajak restoran akan meningkat sebesar 1,761 persen. Koefisien ini membuktikan adanya hubungan positif dari PDRB dengan penerimaan pajak restoran di Kota Padang.
3. Koefisiensi regresi LogX_2 (Jumlah penduduk) sebesar 0,690 menyatakan bahwa setiap perubahan jumlah penduduk sebesar 1 persen akan menyebabkan penerimaan pajak restoran akan meningkat sebesar 0,690 persen. Koefisien ini membuktikan adanya hubungan positif dari jumlah penduduk dengan penerimaan pajak restoran di Kota Padang.
4. Koefisiensi regresi LogX_3 (jumlah kunjungan wisatawan) sebesar 0,710 menyatakan bahwa setiap perubahan jumlah kunjungan wisatawan sebesar 1 persen akan menyebabkan penerimaan pajak restoran akan meningkat sebesar 0,710 persen. Koefisien ini membuktikan adanya hubungan positif dari jumlah kunjungan wisatawan dengan penerimaan pajak restoran di Kota Padang.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian yang berkaitan dengan analisis faktot-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak restoran di Kota Padang dengan menggunakan data yang diambil dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang pada periode 2001-2010. Serta hasil analisis data dan pembahasan pada Bab V sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan antara lain :

1. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak restoran di Kota Padang sebagai variabel terikat dipengaruhi secara signifikan positif oleh variabel bebas PDRB, Jumlah Penduduk, dan Jumlah Kunjungan Wisata.
2. Berpengaruh positifnya variabel PDRB terhadap penerimaan Pajak Restoran dikarenakan PDRB menunjukkan dampak yang sangat besar pada kegiatan ekonomi di Kota Padang sehingga mampu menambah penerimaan pajak restoran.
3. Untuk variabel Jumlah Penduduk juga menunjukkan hubungan yang positif, karena Jumlah Penduduk semakin lama semakin bertambah sehingga dapat memberikan penambahan penerimaan pajak restoran. Sedangkan berpengaruh positifnya jumlah kunjungan wisata terhadap penerimaan pajak restoran yaitu semakin banyak wisatawan yang datang

maka akan semakin meningkatkan pendapatan restoran sehingga akan berpengaruh terhadap penerimaan pajak restoran.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan dan kesimpulan yang diperoleh, maka penulis dapat menyimpulkan saran yang perlu mendapat perhatian :

1. Oleh karena PDRB memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak restoran di kota Padang, maka Pemda Kota Padang perlu mendorong Peningkatan PDRB melalui alokasi anggaran secara efektif untuk sektor ekonomi yang potensial.
2. Jumlah penduduk juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak restoran di Kota Padang, sebaiknya Pemda Kota Padang harus mengontrol pertumbuhan penduduk dan berupaya untuk meningkatkan produktifitas penduduk Kota Padang.
3. Karena variabel jumlah kunjungan wisatawan mempengaruhi penerimaan pajak restoran di Kota Padang secara positif dan signifikan, maka Pemda juga perlu mendorong peningkatan jumlah kunjungan wisatawan melalui pelayanan yang baik, pasti dan maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Halim. 2001. *Manajemen Keuangan Daerah* : UPP AMP YKPN. Yogyakarta
- Astuti, Puji. 2006. *Pengaruh Jumlah Wisatawan, PDRB, Jumlah Penduduk Terhadap Pajak Hotel dan Restoran di Surakarta* : Universitas Muhammadiyah. Surakarta
- Badrudin, Rudy. 2002. *Pengantar Ilmu Ekonomi* : Fisip UAJY. Jogjakarta
- BPS, Sumatera Barat dalam Angka (Seri : 2001-2010). Sumatera Barat : Badan Pusat Statistik
- Boediono. 1992. *Teori Pertumbuhan Ekonomi*. Balai Penelitian Fakultas Ekonomi : Universitas Gajah Mada
- DPKA Kota Padang. *Perkembangan PAD Kota Padang Tahun 2000-2011*
- Fieluphly. 2009. *Defenisi Pariwisata dan Wisata* : Garis Besar Pedoman Pengembangan Ekowisata Indonesia. Jakarta
- Firdaus, Muhammad. 2004. *Ekonometrika Suatu Pendekatan Aplikatif* : Bumi Aksara. Jakarta.
- Gujarati, Damodar. 2003. *Ekonometrika Dasar* : Terjemahan Sumarno Zain, Erlangga. Jakarta
- Indra, Riana. 2008. *Penghasilan Yang Terkena Pajak* : [Http//www.Pajak.com](http://www.Pajak.com)
- Jauhariyyah, Isda. 2010. *Tinjauan atas Pemungutan Pajak Restoran dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung* : Universitas Komputer Indonesia. Bandung
- Liliyana, Yunita. 2010. *Evaluasi Penerimaan Pajak Restoran di DKI Jakarta*. Fakultas Ekonomi : Universitas Indonesia
- Lucihuki. 2011. *Dampak pertumbuhan ekonomi terhadap pertumbuhan penduduk*. [Http//www.ilmudanpengetahuangratis.blogspot.com.html](http://www.ilmudanpengetahuangratis.blogspot.com.html)
- Lutfi, Achmad. 2006. *Penyempurnaan Administrasi Pajak Daerah dan Restribusi Daerah : Suatu Upaya Dalam Optimalisasi Penerimaan PAD*. Jurnal Ilmu

Administrasi dan Organisasi : Bisnis dan Birokrasi, Volume XIV, Nomor I.
Universitas Indonesia

Nugraha dan Arvian Triantoro. 2004. *Analisis Efektifitas Pajak Hotel dan Restoran dan Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Bandung*. Jurnal Ilmu Administrasi Volume 4 No. 1 : Bandung

Miyasto, 1991. *Pajak Penjualan dan Pajak Pertambahan Nilai. Studi Mengenai Dampak terhadap Harga, Penerimaan dan Struktur*. Universitas Gadjah Mada : Yogyakarta

Mudrajat, Kuncoro. 2001. *Metode Kuantitatif : Teori dan Aplikasi*, UPP AMP YKPN : Jogjakarta

Mukhlis, Imam. 2010. *Peran Pajak Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah*. Seminar Regional Perpajakan. Universitas negeri Malang : Malang

Mundiharno. 1998. *Pengertian, Ruang Lingkup dan Bentuk-Bentuk Analisis Ekonomi Kependudukan*. Jakarta

Qadarrahman, Nasrul. 2010. *Analisis Penerimaan Daerah Dari Sektor Pariwisata Di Kota Semarang dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya*. Universitas Diponegoro: Semarang

Rahman, Abdul. 2010. *Strategi Menghadapi Pemeriksaan Pajak: Upaya Legal dalam Kerangka Sistem Administrasi Perpajakan*. Jurnal Ilmu Administrasi Volume VII No. 1 : Bandung

Rindika, Dhisa. 2011. *Penggolongan Pajak*. Pengantar Perpajakan, Penggolongan Pajak. Universitas Sebelas Maret

Salah, Wahab. 2003. *Dimensi Ekonomi Pariwisata: Kajian terhadap dampak Ekonomi dan refleksi dampak pariwisata terhadap pembangunan ekonomi*. Jakarta

Santosa, Purbayu Budi dan Retno Puji Rahayu. 2005. *Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya dalam Upaya Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Kediri*. Jurnal Dinamika Pembangunan Vol. 2 No. 1 : Kediri

Spillane, James J, DR, *Pariwisata Indonesia*, Kanisius, Yogyakarta, 1999

- Siregar, Amri. 2009. *Analisis Tingkat Efektifitas Pajak dan Retribusi Daerah Sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sumatera Utara 1998-2007*. Universitas Sumatera Utara : Medan
- Sofa, Pakde. 2008. *Pengertian, Fungsi dan Jenis Pajak*. Dasar-Dasar Perpajakan Karya Sapri Nurmantu. [Http://massofa.wordpress.com](http://massofa.wordpress.com)
- Spillane, James J. 1999. *Pariwisata Indonesia*, Kanisius, Yogyakarta
- Suhendi, Eno. 2008. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran di Yogyakarta*. Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta
- Sukmaraga. 2011. *Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, PDRB per Kapita, dan Jumlah Pengangguran Terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Tengah*. Universitas Diponegoro : Semarang
- Sukirno, Sadono. 2005. *Pengantar Teori Ekonomi Mikro*, Edisi Ke-3, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- _____. *Pengantar Teori Ekonomi Mikro*, Edisi Ke-3 PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005
- Tim Kajian Kinerja Otonomi Daerah. 2012. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Jakarta
- Utama, I Gusti Bagus Rai. 2011. *Dimensi Ekonomi Pariwisata: Kajian Terhadap Dampak Ekonomi dan Refleksi Dampak Pariwisata Terhadap Pembangunan Ekonomi Provinsi Bali*. Universitas Udayana: Denpasar

LAMPIRAN I

DATA PAJAK RESTORAN, PDRB, JUMLAH PENDUDUK DAN JUMLAH KUNJUNGAN WISATAWAN DI KOTA PADANG 2001-2010

Tahun	Restoran	LogY	PDRB	LogX1	Jumlah Penduduk	LogX2	Jumlah Kunjungan Wisatawan	LogX3
2001	2.026.069.151	9.31	7.353,09	3.87	720.783	5.86	1.180.586	6.07
2002	2.256.887.156	9.35	7.742,46	3.89	734.421	5.87	1.265.434	6.10
2003	2.564.644.495	9.41	8.171,84	3.91	765.450	4.88	1.228.700	6.09
2004	3.911.645.335	9.59	8.652,90	3.94	784.740	4.89	1.006.655	6.00
2005	4.744.157.855	9.68	9.110,70	3.96	801.344	5.90	1.067.056	6.03
2006	5.870.169.164	9.77	9.579,00	3.98	819.740	4.91	1.330.080	6.12
2007	5.941.469.847	9.77	10.165,76	4.01	838.190	4.92	1.453.561	6.16
2008	8.247.380.757	9.92	10.797,26	4.03	856.815	5.93	1.635.753	6.21
2009	7.596.772.297	9.88	11.345,64	4.05	875.750	4.94	1.794.975	6.25
2010	6.922.766.148	9.84	12.021,60	4.08	833.562	5.92	1.870.403	6.27

Sumber : BPS dan DPKA Kota Padang (Data Diolah)

LAMPIRAN II

ANALISIS REGRESI LINEAR BERGANDA

Variables Entered/Removed^b

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Log_X3, Log_X2, Log_X1 ^a		Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: Log_Y

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	.961 ^a	.924	.885	.07637	.07637	69.249	3	6	.000	1.585

a. Predictors: (Constant), Jumlah Kunjungan Wisata, Jumlah Penduduk, PDRB

b. Dependent Variable: Pajak Restoran

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.423	3	.141	24.197	.000 ^a
	Residual	.035	6	.006		
	Total	.458	9			

a. Predictors: (Constant), Jumlah Kunjungan Wisata, Jumlah Penduduk, PDRB

b. Dependent Variable: Pajak Restoran

LAMPIRAN III

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	-.884	1.721		-.513	.626		
PDRB	3.761	.627	1.175	5.994	.001	.681	1.469
Jumlah Penduduk	.690	.154	.207	4.481	.019	.869	1.150
Jumlah Kunjungan Wisata	.710	.149	.286	4.765	.010	.742	1.348

a. Dependent Variable: Pajak Restoran

Collinearity Diagnostics^a

Model	Dimension	Eigenvalue	Condition Index	Variance Proportions			
				(Constant)	Log_X1	Log_X2	Log_X3
1	1	3.994	1.000	.00	.00	.00	.00
	2	.006	25.209	.00	.00	.93	.00
	3	.000	164.105	.85	.19	.01	.02
	4	4.103E-5	311.967	.15	.81	.05	.97

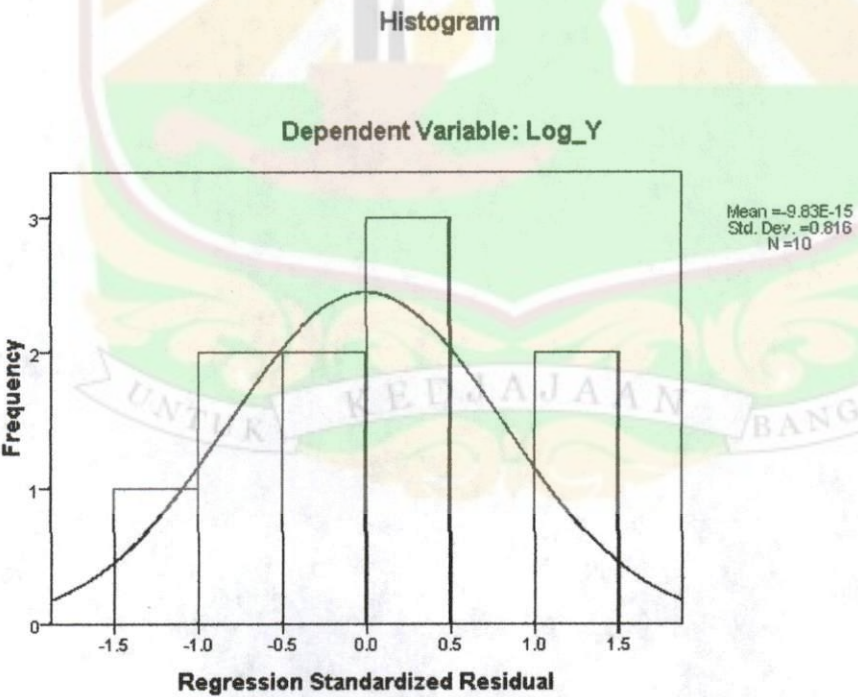
a. Dependent Variable: Log_Y

LAMPIRAN IV

Residuals Statistics^a

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	9.3069	9.9541	9.6520	.21689	10
Std. Predicted Value	-1.591	1.393	.000	1.000	10
Standard Error of Predicted Value	.034	.060	.048	.008	10
Adjusted Predicted Value	9.3043	10.0651	9.6616	.22897	10
Residual	-.11408	.11143	.00000	.06235	10
Std. Residual	-1.494	1.459	.000	.816	10
Stud. Residual	-2.098	1.743	-.049	1.045	10
Deleted Residual	-.22511	.15892	-.00962	.10355	10
Stud. Deleted Residual	-3.714	2.263	-.151	1.529	10
Mahal. Distance	.910	4.602	2.700	1.179	10
Cook's Distance	.001	1.071	.172	.332	10
Centered Leverage Value	.101	.511	.300	.131	10

a. Dependent Variable: Log_Y



One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

LAMPIRAN V

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

